

No. **123** Maret - April 2016

BaKTI**News**

www.bakti.or.id

MEMAHAMI KTI DENGAN SEKSAMA

- **5 Salah Kaprah Tentang Indonesia Timur**
- **Meraup Manfaat dari Kotoran Ternak**
- **Waktu Sama Dengan Uang di Adonara**
- **The Dark Side of Chocolate**

TIDAK DIPERJUALBELIKAN
NOT FOR SALE

ISSN 1979-777X



9 771979 777057



BaKTI**News**

MEMAHAMI KTI DENGAN SEKSAMA

ISSN 1979-777X

www.bakti.or.id

Editor CAROLINE TUPAMAHU
VICTORIA NGANTUNG
SYAIFULLAH DG. GASSING
Suara Forum KTI ZUSANNA GOSAL
ITA MASITA IBNU
Events at BaKTI SHERLY HEUMASSE
Website ADITYA RAKHMAT

Smart Practices & Info Book SUMARNI ARIANTO
Database Kontak A. RINI INDAYANI
Design & layout ICHSAN DJUNAED
Editor Foto

Redaksi

Jl. H.A. Mappanyukki No. 32 Makassar 90125, Sulawesi Selatan - Indonesia Telp. +62 411 832228, 833383 Fax +62 411 852146

Email info@bakti.or.id atau baktinews@bakti.or.id SMS BaKTI**News** 0813 4063 4999, 0815 4323 1888, 0878 4000 0201

Facebook www.facebook.com/jayasanbakti Twitter @InfoBaKTI

BaKTI**News** adalah media pertukaran pengetahuan tentang pembangunan di Kawasan Timur Indonesia. Tujuan BaKTI**News** adalah mempromosikan praktik cerdas pembangunan dari berbagai daerah di Kawasan Timur Indonesia agar dapat diketahui oleh khalayak luas dan menginspirasi pelaku pembangunan di berbagai daerah dalam upaya menjawab berbagai tantangan pembangunan. BaKTI**News** terbit setiap bulan dalam dua bahasa, Indonesia dan Inggris, untuk memudahkan pembaca dalam mendapatkan informasi pembangunan dari Kawasan Timur Indonesia.

BaKTI**News** disirkulasi melalui pos kepada pembaca dengan target utama adalah para pelaku pembangunan yang berdomisili di daerah kepulauan dan daerah terpencil. Tidak dikenakan biaya apapun untuk berlangganan BaKTI**News** agar lebih banyak masyarakat yang dapat mengakses informasi pembangunan melalui majalah ini. Selain dalam bentuk cetak, BaKTI**News** juga dapat diakses di website BaKTI: www.bakti.or.id dan dikirimkan melalui email kepada pelanggan yang dapat mengakses internet.

BaKTI**News** dikelola oleh Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia (BaKTI). Seluruh artikel BaKTI**News** adalah kontribusi sukarela para pelaku pembangunan dari berbagai kalangan dan daerah yang ingin

berbagi pengetahuan dengan khalayak luas.

BaKTI**News** is a knowledge exchange media platform for development issues in eastern Indonesia. BaKTI**News** aims to promote development smart practices from different regions in eastern Indonesia so that the practices become known to a wider audience and inspire development stakeholders in other regions in their efforts to answer development challenges. BaKTI**News** is published monthly in two languages, Indonesian and English, to facilitate readers who don't understand Indonesian to gain a better understanding of development in eastern Indonesia.

BaKTI**News** is sent by post to readers and the main target is development stakeholders living in isolated regions and island regions. BaKTI**News** is provided free of charge so the development community can access relevant development information easily. BaKTI**News** is also provided in an electronic version that can be accessed on www.bakti.or.id and can be sent electronically to subscribers with internet access.

BaKTI**News** is managed by the Eastern Indonesia Knowledge Exchange (BaKTI). All articles are contributed voluntarily by development stakeholders from different areas in eastern Indonesia who wish to share their information with a wider audience.

BERKONTRIBUSI UNTUK BaKTI**News**

BaKTI**News** menerima artikel tentang kemajuan pembangunan, pembelajaran dari suatu kegiatan, praktik cerdas pembangunan, hasil-hasil penelitian yang dapat diaplikasikan, dan teknologi tepat guna dari berbagai daerah di Kawasan Timur Indonesia (Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua).

Panjang artikel adalah 1.000 - 1.100 kata, menggunakan Bahasa Indonesia maupun Inggris, ditulis dengan gaya populer. Foto-foto penunjang artikel sangat dibutuhkan. Tim editor BaKTI**News** akan melakukan edit terhadap setiap artikel yang akan dimuat untuk kesesuaian tempat dan gaya bahasa. Redaksi BaKTI**News** tidak memberikan imbalan kepada penulis untuk setiap artikel yang dimuat.

BaKTI**News** accepts articles about development programs, lessons learnt from an activity, development smart practices, research results that can be applied, and applied technology from different stakeholders and regions in eastern Indonesia (Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, and Papua). Articles should be 1,000-1,100 words, in either Indonesian or English, and written in a popular style.

Articles should also be sent with photos that illustrate the article. The editors of BaKTI**News** will edit every article for reasons of space and style. BaKTI**News** does not provide payment to writers for articles.

MENJADI PELANGGAN BaKTI**News**

Subscribing to BaKTI**News**

Untuk berlangganan BaKTI**News**, silahkan mengirimkan data diri anda (organisasi, posisi, nomor HP, alamat email) lengkap dengan alamat lengkap yang disertai dengan kode pos melalui email baktinews@bakti.or.id.

Bagi yang berdomisili di Makassar, Anda dapat mengambil BaKTI**News** di Display Corner Gedung BaKTI pada setiap hari kerja.

To subscribe to BaKTI**News** please send us your full contacts details (including organization, position, HP number and email address) with full postal address to baktinews@bakti.or.id.

For those living in Makassar, please stop by the BaKTI office and pick up your copy from the display corner from Monday to Friday.

Daftar Isi

BaKTINews

Juli - Agustus 2015

No. 123

- 1** 5 Salah Kaprah Tentang Indonesia Timur
Oleh **Yusran Darmawan**
- 5** MCA-Indonesia
Meraup Manfaat dari Kotoran Ternak
Oleh **Syaifullah**
- 9** Praktik Cerdas
Waktu Sama Dengan Uang di Adonara
Oleh **Eko Rusdianto**
- 14** Sosok
Rus, Profil Politisi Perempuan
Oleh **M. Ghufan H. Kordi K. & Sitti Zahara**
- 17** Lingkungan
Imbal Jasa Lingkungan Air
 demi Keberlanjutan Sumber Daya Alam
- 21** Pulau Karanrang dan
Kehidupannya
- 24** Infografis
- 27** Didik Anak Anda Untuk Tidak
Memperkosanya, Bukan Cara Berpakaian
Oleh **Nadia Hana Abraham**

- 29** Update Program MAMPU - BaKTI
Workshop Legal Drafting
dan PPRG
Oleh **M. Ghufan H. Kordi K.**
- 33** Pendidikan
Edukasi Pencegahan Kekerasan
Seksual
Oleh **Andi Arifayani**
- 35** Child Labour;
The Dark Side of Chocolate
Oleh **Andi Fery Pebriari**
- 39** Update BatukarInfo
- 40** Kegiatan BaKTI
- 41** Info Buku

Foto sampul : Ichsan Djunaed

Pada 2009, Komnas Perlindungan Anak melansir bahwa di negeri ini ada sekitar 6,5 juta pekerja anak dan 2,1 juta di antaranya bekerja di lingkungan terburuk seperti prostitusi, perdagangan anak, pembantu rumah tangga, serta di tempat kerja lainnya yang amat berbahaya bagi keselamatan.

Mereka bisa jadi tidak dapat menikmati hak-hak dasar atas pendidikan, keselamatan fisik, perlindungan, bermain, dan rekreasi.



5 SALAH KAPRAH Tentang Indonesia Timur

Oleh **Yusran Darmawan**

Sebagai seorang warga Indonesia timur, yang kini berdiam di Indonesia sebelah barat, saya mengalami banyak salah kaprah tentang kawasan timur. Sering saya menemukan anggapan yang keliru dari penduduk di Indonesia barat terhadap kami yang di timur. Makanya, saya berkesimpulan kalau orang timur lebih banyak tahu tentang kota-kota, jarak, serta masyarakat di barat. Sementara orang Indonesia barat malah tak banyak tahu tentang apa yang terjadi di timur.

Kesimpulan itu semakin kokoh saat membaca catatan pengantar dari Roem Topatimasang di buku berjudul *Melawat ke Timur*. Catatannya membuka banyak hal. Mulai dari stereotype, pandangan tentang kemajuan, serta salah kaprah yang terus eksis dalam sejarah kita.

SUATU hari, Roem Topatimasang sedang berada di Tual, Kepulauan Kei. Ia dihubungi rekannya yang sedang transit di Bandara Pattimura, Ambon, Maluku. Teman

itu memintanya untuk bertemu di bandara. Ada hal penting yang ingin dibicarakan. Saat Roem mengatakan sedang berada di Tual, teman itu mengatakan akan menunggu. Katanya, waktu transitnya cukup panjang yakni enam jam.

Roem bersungut-sungut lalu menutup telepon, Ia lalu berkata, “Dasar.. dorang pikir jarak Tual sampai Ambon itu sama dengan Grogol–Cengkareng kah?” Saya tersenyum-senyum saat membaca catatan Roem

tentang salah kaprah atas mereka yang di barat terhadap keadaan di timur. Saya punya banyak pengalaman sebagaimana yang dialaminya.

Semasa jadi jurnalis, saya pernah meliput satu peristiwa di Makassar. Tak lama kemudian, datang telepon dari redaktur di Jakarta yang meminta saya untuk bergerak ke Bulukumba dalam waktu setengah jam. Katanya, ada kejadian besar di sana. Saya berteriak melalui telepon, “Ko pikir jarak Makassar ke Bulukumba hanya setengah jam?”

Mungkin pelajaran geografi tidak banyak diberikan di sekolah dasar. Buktinya, banyak orang yang mengira jarak tempuh antar kota di timur sama dengan jarak tempuh antar kawasan di barat sana. Tak banyak yang paham bahwa infrastruktur di timur sedemikian parah sehingga jarak tempuh itu menjadi sedemikian jauh.

Catatan yang dibuat Roem untuk buku yang berisikan pengalaman berpetualang di timur ini telah membuka banyak lapis kenyataan. Betapa banyaknya salah kaprah tentang timur di barat. Tak banyak yang tahu kalau Ternate adalah salah satu dari tiga kerajaan Islam terbesar di Nusantara, selain Samudra Pasai di Sumatra, dan Demak di Jawa. Wilayah Ternate mencakup seluruh Kepulauan Maluku, Sulawesi bagian tengah, selatan Filipina, hingga ke Nusa Tenggara Timur (NTT). Tak banyak yang tahu kalau Papua adalah wilayah kekuasaan Kesultanan Tidore.

Tak hanya kisah tentang wilayah. Ada banyak hal unik di timur. Sultan Khairun dari Ternate bersahabat baik dengan Santo Fransiscus Xaverius, pembawa agama katolik di Maluku. Ayah Sultan Baabullah yang merupakan satu-satunya raja di Nusantara yang pernah mengalahkan Portugis, Spanyol, dan Belanda itu pernah tinggal di Biara Katolik dan mengikuti pendidikan tarekat Jesuit di Goa (India), lalu mendapatkan nama baptis: Ben Acorata.

Barangkali tak ada pula yang tahu kalau salah satu intelektual yang cemerlang di Nusantara pada abad ke-17 bernama Karaeng Pattingaloang, seorang mangkubumi di Kesultanan Goa di Makassar, Sulawesi Selatan. Pattingaloang mendatangkan teleskop Galileo ke tanah Makassar demi mengamati bulan dan pergerakan bintang. Ia mendirikan satu observatorium bintang, yang dalam bahasa Makassar disebut Maccini Sombala. Ia bercakap dalam banyak bahasa, menerjemahkan beberapa kitab ilmu pengetahuan ke dalam bahasa Makassar. Di masa itu, Makassar adalah

kota dunia yang melakukan reproduksi pengetahuan untuk membangun peradaban yang kokoh.

Bahkan seorang dramawan dan penyair terbesar Belanda, yang hidup sejaman dengan pelukis Rembrandt, Joost van den Vondel, memuji Pattingalloang dalam sajak khusus yang dibuat untuknya. Tak hanya itu, peta kuno yang dibuat Joan Bleu menempatkan Pattingalloang sejajar dengan Mercator, nabi modern kartografi Eropa.

Pertanyaannya, seberapa pahamkah kita tentang beberapa keping sejarah yang menakjubkan di kawasan timur?

SEJAK Indonesia berdiri, kawasan timur menjadi kawasan yang seolah terabaikan. Sejarah Indonesia identik dengan apa yang terjadi di Indonesia barat. Apa yang terjadi di timur tidak menjadi memori kolektif bagi bangsa Indonesia. Pengetahuan dipancarkan dari pusat-pusat pertumbuhan, yakni kota-kota yang benderang oleh kebijakan pemerintah di barat sana. Timur menjadi tertinggal, sampai-sampai pernah dibentuk kementerian untuk urusan ketertinggalan di timur.

Dikarenakan pengetahuan seolah berpusat di kota-kota di Indonesia bagian barat, salah kaprah tentang timur menyebar merata di banyak tempat. Orang-orang di barat merasa tak punya kepentingan untuk memahami timur. Mereka lalu menggenerasilir, membangun stereotype, dan menganggap sama Indonesia timur, sebagaimana kampung halamannya yang punya infrastruktur lengkap.

Mengacu pada pengalaman Roem Topatimasang, saya mencatat ada sekurang-kurangnya lima salah kaprah tentang timur di mata orang Indonesia barat. Saya menemukan salah kaprah ini dalam berbagai interaksi dengan banyak sahabat berbagai etnik di Jakarta.

Anggapan tentang bahasa



Sering saya susah menjelaskan ke banyak orang kalau di kampung halaman saya, Buton, Sulawesi Tenggara, terdapat begitu banyak bahasa. Orang luar mengira semua orang Buton akan berbahasa lokal yang sama. Padahal, faktanya tidak demikian. Pemetaan bahasa yang dilakukan beberapa peneliti menunjukkan adanya keragaman bahasa

Semakin ke timur, semakin banyak bahasa. Jika pernah ke Maluku Utara hingga Papua, jangan terkejut ketika menemukan begitu banyak bahasa lokal. Terkadang satu bahasa daerah hanya digunakan oleh warga satu kampung. Sungguh berbeda dengan orang Jawa dan Sunda yang bahasa lokalnya satu dan dimengerti oleh jutaan orang.

Karena bahasa yang demikian seragam, bahasa Indonesia menjadi bahasa yang mempersatukan dan mengikat warga yang berbeda bahasa lokal tersebut. Di timur, saya bisa menggaransi kalau semua orang bisa bahasa Indonesia. Sungguh beda dengan keluarga mertua kakak saya di Cangkringan, Yogyakarta, yang setiap hari berbahasa Jawa, dan sama sekali tak paham bahasa Indonesia.

Anggapan tentang geografis



Entah kenapa, saya banyak bertemu dengan orang yang menganggap jarak-jarak antar wilayah dekat. Dari kampung saya di Buton menuju Makassar, saya butuh waktu semalam perjalanan kapal. Beberapa orang Wakatobi yang berlayar ke Taliabu, Bacan, hingga Obi, sering membutuhkan waktu lebih sebulan dengan menggunakan kapal layar.

Saat saya ceritakan ini ke teman di Jakarta, ia malah terheran-heran. Dipikirkannya, semua tempat bisa dijangkau dengan kereta, sebagaimana di Jawa. Padahal, timur itu identik dengan pulau-pulau. Tak selalu ada “kapal putih”, sebutan untuk kapal Pelni yang bisa singgah dan mengangkut penumpang. Perjalanan ke beberapa wilayah di timur mesti menyiapkan fisik kuat sebab seringkali harus ditempuh dengan kapal layar. Bagi yang pernah bertualang ke Papua pasti punya banyak kisah bagaimana bergerak ke satu desa bisa butuh waktu sehari-hari.

Anggapan tentang penduduk yang mayoritas beragama Kristen.



Tentu saja, anggapan ini keliru. Buku Melawat ke Timur ini menunjukkan kekeliruan itu. Maluku, yang dianggap Kristen, ternyata memiliki banyak desa-

desa beragama Islam. Tahukah anda bahwa Pattimura, pahlawan beragama Kristen yang punya nama lengkap Thomas Mattulessy, ternyata punya saudara adat (pela-gandong) dengan pahlawan Maluku lain yang beragama Islam yakni Said Perintah. Tahukah anda Sekjen pertama Dewan Adat Papua adalah seorang muslim asal Fakfak bernama Thaha Alhamid? Tak banyak pula yang tahu kalau nama bandara di Ende adalah Haji Hasan Aboeroesman, yang merupakan raja terakhir, sekaligus bupati pertama. Dia seorang Muslim.

Yang menakjubkan adalah sejarah masyarakat di timur tak pernah mempersoalkan perbedaan agama tersebut. Saat Gubernur Jenderal VOC Jan Pieterzoon Coen membantai banyak warga Muslim di Banda pada tahun 1621, warga Kei beragama Kristen justru menyediakan tanah untuk menampung saudaranya yang Muslim itu. Mungkin Anda akan tercengang saat tahu kalau di wilayah Kesultanan Ternate di Halmahera Utara, terdapat warga Tobelo yang beragama Kristen. Semuanya baik-baik saja.

Memang, belakangan terjadi konflik atas nama agama di Maluku, akan tetapi warga menganggap konflik itu lebih bernuansa politik ketimbang agama. Yang menakjubkan, perdamaian antar warga dibangun berdasarkan spirit kekeluargaan, serta keyakinan kalau mereka sama-sama orang Maluku, meskipun punya keyakinan berbeda.

Hubungan antara agama dan adat



Di banyak tempat, seringkali adat disesatkan oleh agama. Makanya, kita membaca episode sejarah tentang Perang Padri di Sumatera Barat, Perang Cumbok di Aceh.

Semuanya menunjukkan bagaimana benturan antara agama dan adat di masyarakat. Tapi di timur, adat dan agama bisa hidup berdampingan. Adat bisa menjadi wadah, sedangkan agama menjadi isinya. Agama menjadi spirit kuat yang lalu dijemakan dalam adat.

Saya setuju dengan pernyataan Roem di buku ini yang melihat adanya pola berbeda dengan sinkretisme Islam a la Jawa. Makanya, yang harus dilakukan adalah berusaha memahami kenyataan itu secara mendalam, lalu menyusun argumentasi sendiri yang khas Indonesia timur.

Adanya stereotype tentang penduduk di timur yang dianggap kasar-kasar.



Terhadap anggapan ini saya punya banyak pengalaman. Memang, dari sisi intonasi suara, orang Timur punya suara yang keras di telinga warga Indonesia barat. Namun yakinlah, itu bukan ekspresi kemarahan. Intonasi suara yang keras itu biasanya dimiliki warga yang tinggal di pesisir, yang berusaha mengalahkan suara ombak. Warga di pegunungan pun punya intonasi yang sama. Tak ada kaitan antara suara yang keras dengan pribadi yang kasar.

Untuk soal pertemanan, orang di timur adalah teman-teman terbaik. Saya tak menemukan solidaritas sehebat teman-teman di timur itu. Jika Anda dianggap sebagai sahabat, maka mereka akan siap menyalungi nyawa demi Anda. Mereka siap melakukan apapun demi seorang sahabat. Namun sekali Anda hendak berkonflik dengan mereka, maka mereka bisa menjadi sangat jahat. Mereka bisa nekat jika Anda menyinggung kehormatannya. Tapi, kepribadian mereka selalu luwes. Jika sebelumnya marah, mereka bisa kembali menjadi baik jika ada yang bertindak sebagai pendamai. Bersama mereka, kehidupan menjadi lebih indah.

DAFTAR di atas memang terlampau singkat untuk menjelaskan banyak salah kaprah tersebut. Saya hanya menyederhanakannya saja. Dalam interaksi sehari-hari, saya menemukan banyak hal menarik yang semakin menguatkan pandangan saya tentang dinamika di timur dan barat tanah air kita.

Dalam hal pengetahuan tentang wilayah, saya sangat yakin kalau orang timur cukup mengenali keadaan di barat. Hampir semua orang di timur tahu tentang Bandung, Semarang, juga Surabaya.

Tapi coba Anda tanya tentang kawan di Indonesia barat tentang kota-kota seperti Tual, Morotai, Kaimana, Nabire, atau Paniai, pastilah mereka akan melongo.

Kita bisa mengatakan bahwa terjadi disparitas informasi antara timur dan barat. Harus diakui, Indonesia barat lebih banyak dideskripsikan di media massa kita. Makanya, timur menjadi wilayah yang misterius dan tak banyak dikenal. Timur menjadi asing. Logat a la timur menjadi aneh di telinga.

Disparitas informasi jelas dipengaruhi tayangan media. Tentu saja, media massa akan banyak membahas daerah yang berpenduduk padat, sebab di situ ada pasar pembaca yang besar. Logika inilah yang membuat timur tak banyak dideskripsikan. Timur menjadi sesuatu yang lain, sesuatu yang eksotik dan tak banyak dikunjungi. Sejarahnya menjadi gelap dan seakan lenyap dari sejarah. Padahal, ada banyak sejarah gemilang tanah air kita yang ada di timur sana. Yang kita butuhkan adalah kesediaan untuk menyerap pengetahuan, lalu menjadikan timur sebagai pusat pengetahuan, sekaligus pusat pertumbuhan ekonomi.

Selama puluhan tahun tanah air kita dikelola dengan logika populasi. Timur seakan tak tersentuh pembangunan, sebab penduduknya dianggap sedikit. Pernah, saya mengalami perjalanan yang sangat jauh di Mamasa, Sulawesi Barat, ke satu desa terpencil. Butuh perjalanan seharian untuk menjangkau desa di pegunungan. Jalan rusak parah. Sepanjang jalan saya membatin, mengapa pula jalan kita rusak parah. Saat saya tanyakan ke warga, dijawab kalau jalan itu adalah jalan nasional, yang sejak puluhan tahun diabaikan pemerintah.

Saya membatin kalau pemerintah kita lebih fokus ke daerah-daerah padat penduduk. Pemerintah lebih fokus membangun kereta cepat Jakarta – Bandung, ketimbang membangun jalan nasional di kawasan timur. Ah, kali ini saya tak bisa berkomentar apa-apa. Saya hanya bisa masygul.

INFORMASI LEBIH LANJUT

Penulis adalah peneliti, antropolog dan blogger yang kini tinggal di Bogor. Tulisan-tulisannya dapat dilihat di www.timur-angin.com



MILLENNIUM CHALLENGE ACCOUNT - INDONESIA GREEN KNOWLEDGE ACTIVITY - GREEN PROSPERITY PROJECT

Meraup Manfaat dari Kotoran Ternak

Oleh **Syaifullah**

*Lebih baik gagal setelah mencoba,
daripada tidak mencoba sama sekali*

Lalu Wildan, pendiri pesantren Isti'daduddarain, Dusun Orong Lamput, Desa Medane, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat.

Bermula di tahun 2011, ketika salah seorang alumni pesantren Isti'daduddarain bernama Basri yang kebetulan memiliki keahlian bertukang diikuti dalam pelatihan yang diadakan oleh HiVOS di Lombok.

Segera setelah pelatihan bersama HIVOS selesai, Basri mempraktikkan pengetahuan baru ke pesantren tempatnya pernah menimba ilmu. Lalu Wildan, sang pendiri pesantren sangat mendukung upaya yang dibawa



Kini inovasi pesantren Isti'daduddarain dalam memanfaatkan limbah kotoran manusia menjadi energi biogas membuat banyak pihak tertarik untuk berkunjung dan melihat langsung reaktor biogas buatan mereka.

Foto Dok. Yayasan BaKTI/Syaifullah Dg. Gassing

Basri ke pesantren: mengubah kotoran menjadi energi.

Dengan modal sendiri, pesantren Isti'daduddarain mulai membangun reaktor biogas. Setelah reaktor selesai, mereka juga mengupayakan sendiri kotoran sapi dengan cara membeli dari warga sekitar. Percobaan pertama selesai. Mereka akhirnya mampu menikmati pasokan listrik dari biogas hasil olahan kotoran sapi.

Rupanya percobaan pertama ini tidak membuat mereka cepat puas. Sebuah ide terlintas. Bagaimana kalau menggunakan kotoran manusia? Toh kalau itu berhasil, mereka tidak perlu lagi repot-repot membeli kotoran sapi dari penduduk.

Pesantren Isti'daduddarain dihuni 120 santri yang tinggal di asrama putra dan putri. Untuk memenuhi kebutuhan biogas dari olahan kotoran manusia, tentu saja tidak ada masalah. Setiap hari akan ada saja kotoran dari para penghuni asrama, belum termasuk sisa makanan yang juga bisa diubah menjadi biogas. Jelas itu akan lebih efektif dan murah dari segi biaya.

Dengan dukungan penuh dari Lalu Wildan, Basri kemudian memodifikasi instalasi bio gas yang sudah jadi sebelumnya. Di luar dugaan, percobaan mereka ternyata sukses bahkan melampaui harapan. "Pertama kali, gasnya sampai meluap-luap. Kandungan gas kotoran manusia ternyata lebih tinggi dari kotoran sapi," kata Lalu Wildan.

Kesalahan demi kesalahan kecil terus diperbaiki, sampai akhirnya reaktor biogas di pesantren itu yang berkapasitas 8 m³ selesai. Sejak tahun 2011 hingga sekarang reaktor ini beroperasi. Pesantren Isti'daduddarain tidak lagi membeli gas untuk keperluan memasak. Dalam sebulan berhemat Rp. 700 ribu. Selain itu, ampas dari biogas yang lazim disebut *bio slurry* juga dapat dimanfaatkan menjadi pupuk meski saat ini belum dimaksimalkan.

Awal yang Menantang

Ternyata Pesantren Isti'daduddarain adalah yang pertama menggunakan kotoran manusia sebagai bahan utama untuk biogas di pulau Lombok, bahkan mungkin di Nusa Tenggara Barat. "Program ini awalnya tidak mudah. Biogas adalah hal baru dan masih susah diterima. Banyak warga yang ragu karena teknologi ini memanfaatkan kotoran hewan," kata Krisna Wijaya. Keraguan warga juga termasuk soal kesehatan dan bahkan halal tidaknya energi biogas. Selain itu warga juga ragu apakah gas dari kotoran hewan dapat memengaruhi rasa dari masakan atau minuman yang dimasak.

Dalam pengalaman Lalu Wildan dan pesantren Isti'daduddarain, seluruh keraguan warga soal biogas ternyata tidak terbukti. Meski bahan utama biogas adalah kotoran hewan, bahkan kotoran manusia, Lalu Wildan sama sekali tidak merasa jijik atau ragu akan kehalalannya.

"Sahabat Rasulullah saja pernah memanfaatkan kotoran unta untuk bahan bakar. Kotoran itu dikepal-kepal dengan tangan sebelum digunakan



Reaktor biogas yang dikembangkan di pesantren Isti'daduddarain (kiri) dan lahan pertanian yang memanfaatkan Bio-slurry sebagai pupuk alami (kanan).
Foto Dok. Yayasan BaKTI/Syaifullah

dan Rasulullah sama sekali tidak melarangnya. Nah, apalagi biogas ini. Ini kan kotorannya tidak disentuh langsung, hanya gasnya saja yang diambil,” ujar Lalu Wildan meyakinkan bahwa pemanfaatan biogas sama sekali tidak melanggar larangan agama.

Karena sang pendiri pesantren sudah yakin, maka tentu saja para penghuni pesantren lainnya juga ikut yakin. Sama sekali tidak ada rasa ragu

apalagi jijik untuk menggunakan bio gas, meski bahan dasarnya dari kotoran manusia. “Iya, sama sekali tidak ada rasa jijik.” Kata Helna Syakira, salah satu siswa perempuan pesantren Isti'daduddarain yang biasa menggunakan kompor bio gas untuk memasak.

Program GADING

Saat ini dengan dukungan dari Millenium Challenge Account Indonesia (MCAI), HiVOS dan konsorsium yang beranggotakan Universitas Wangeringen-Belanda dan Yayasan Rumah Energi (YRE) sedang mengembangkan program Pengumpulan dan Diseminasi Informasi

Pesantren Isti'daduddarain

Ratusan murid berbaris tertib di halaman sekolah. Mereka melafalkan ayat Al Qur'an sesuai instruksi dari ustad atau pengajar dengan suara lantang. Berbaris dan melafalkan ayat-ayat Al Qur'an dengan suara lantang sebelum memulai pelajaran adalah ritual harian murid-murid pondok pesantren Isti'daduddarain.

Isti'daduddarain dalam bahasa Arab kira-kira berarti mempersiapkan jalan ke dua dunia. Kalimat itu dipilih untuk menggambarkan tujuan pesantren ini mendidik siswa yang siap dan mampu berjalan di jalan dunia dan jalan akhirat serta mampu menyeimbangkannya.

Pesantren yang berdiri sejak tahun 1995 ini terletak di Dusun Orong Lamput, Desa Medane, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat. Adalah Lalu Wildan yang jadi pendirinya. “Dalam sebuah kitab dikatakan; akan disiksa mereka yang berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya. Itu yang tiang pikir sampai menangis.” Kata Lalu Wildan.

Ketakutan itulah yang membuatnya bertekad mengamalkan ilmu yang dimilikinya. Awalnya murid pesantrennya hanya 15 orang, namun terus bertambah seiring berjalannya waktu. Di tahun ajaran 2015/2016 sudah ada 120 siswa yang jadi siswa di pesantren Isti'daduddarain. Murid-murid pesantren datang dari berbagai daerah di Lombok,



Pengetahuan Hijau untuk Pertanian Terpadu Berkelanjutan untuk Tenaga Tani di Indonesia (GADING).

Program GADING ini akan bertindak sebagai tenaga pendukung dari BIRU (Biogas Rumah Tangga) yang telah diadopsi oleh program sukses dari HIVOS. Diharapkan GADING akan meningkatkan keahlian dan kapasitas dari petani untuk menggunakan *bio-slurry* atau bio-lumpur agar tenaga kerja pria dan wanita di pedesaan mendapatkan penghasilan dari usaha bisnis seperti produksi pupuk organik, produksi Lemna, akuakultur, pembangunan kolam, pengembangan ternak, penanaman sayur dan buah dan jual

bahkan dari luar pulau Lombok. “Kami bahkan pernah dapat siswa dari Papua.” Kata Lalu Wildan.

Sebagian besar dari mereka adalah siswa Madrasah Ibtidaiyah (setingkat SD). Saat ini inovasi mereka dalam memanfaatkan limbah kotoran manusia menjadi energi biogas membuat banyak pihak tertarik untuk berkunjung dan melihat langsung reaktor biogas buatan mereka.

Inovasi dan keberanian mereka mencoba memanfaatkan kotoran manusia menjadi bio gas menunjukkan sikap pesantren yang terbuka dan berwawasan luas. Mereka tidak hanya fokus pada kegiatan menuntut ilmu dan berdakwah saja tapi juga menerima perubahan yang bermanfaat positif buat mereka.

beli hasil tani dengan menggunakan perantara (*middle-man*), seperti hasil ternak, Lemna, pupuk, dan pakan ternak.

Selain di Nusa Tenggara Barat, GADING juga dilaksanakan di Nusa Tenggara Timur, Yogyakarta dan Jawa Barat.

Program ini juga sekaligus akan menjawab pertanyaan tentang kegunaan bio gas. Bio gas yang bahan dasarnya adalah kotoran, ternyata bisa punya manfaat yang banyak. Bukan sekadar untuk kegiatan masak-memasak saja, tapi bisa lebih dari itu.

Apa yang dilakukan oleh HIVOS dengan program BIRU dan GADING-nya adalah contoh riil bagaimana kotoran yang selama ini mungkin tak diperhatikan dan hanya dianggap sekadar sampah dan pembawa penyakit, ternyata dengan usaha lebih bisa diolah menjadi sesuatu yang berguna.

Pesantren Isti'daduddarain salah satu contohnya. Dengan keberanian untuk mencoba, mereka berhasil memanfaatkan kotoran manusia menjadi energi. Nyaris tak ada halangan berarti bagi mereka yang memang berani mencoba hal baru dan tidak terkungkung dalam pemahaman sempit. Seperti kata Lalu Wildan, lebih baik gagal karena mencoba daripada tidak mencoba sama sekali.

INFORMASI LEBIH LANJUT

Untuk mendapatkan info lebih lanjut mengenai Aktivitas Pengetahuan Hijau - Proyek Kemakmuran Hijau MCA-Indonesia, hubungi info@bakti.or.id



PRAKTIK CERDAS

Waktu Sama Dengan Uang di Adonara

Oleh **Eko Rusdianto**
Editor **Sumarni Arianto**



Rumput di kebun Daniel sudah setinggi pinggang orang dewasa. Semak belukar dan tumbuhan rambat liar tumbuh subur memenuhi kebun. Kebunnya terlihat seperti tak terurus. Untuk mengerjakan sendiri akan sulit buat Daniel, untungnya kini hal itu bukan masalah lagi. Ia hanya perlu mengajukan pinjaman untuk meminta bantuan tenaga kerja pada Koperasi di kampungnya yakni Kampung Honihama.

Kampung Honihama, Desa Tuwagoetobi, Kecamatan Witimaha, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur terletak di wilayah perbukitan yang berbatu dan kering. Sepanjang mata memandang, terlihat tanaman jagung, kelapa, jambu mete dan beberapa kakao.

Desa Tuwagoetobi seluas 7,34 kilometer persegi dihuni oleh 1.720 jiwa. Sebagian besar penduduk Tuwagoetobi bekerja sebagai Tenaga

Kerja Indonesia di Malaysia. Mereka meninggalkan lahan-lahan mereka di kampung. Puluhan kebun di Tuwagoetobi pun menganggur menjadi lahan tak produktif.

Mengembalikan semangat gotongroyong

Musim kering di Tuwagoetobi berlangsung cukup lama, dari Mei hingga November. Para petani selalu bersiap menghadapi masa paceklik dengan bercocok tanam musiman. Mereka saling mengunjungi kebun dan menawarkan bantuan. Gerakan ini mereka namakan gemohing.

Awal tahun 2010, Kamilus Tupen Jumat (50 tahun), seorang warga Honihama yang pernah bekerja puluhan tahun sebagai Tenaga Kerja Indonesia di Malaysia, berinisiatif untuk membentuk sebuah kelompok tani berdasarkan hubungan kemanusiaan. Berlandaskan semangat saling membantu dan menjaga, dari budaya gemohing inilah yang melahirkan Kelompok Tani Lewowerang (KTL).

Pada awal berdiri jumlah anggota hanya 30 orang, namun hanya butuh dua minggu beberapa warga berdatangan hingga mencapai 72 orang. Kini kelompok ini telah beranggotakan 300 orang, baik yang berada di kampung maupun yang sedang bekerja di luar negeri.

Menggerakkan usaha jasa tanpa mengandalkan uang

Kelompok Tani Lewowerang punya struktur organisasi dan tugas masing-masing anggota. Hanya saja, kelompok ini membentuk koperasi yang tidak biasa. Koperasi mereka tidak mengandalkan jaminan uang, melainkan jasa tenaga kerja.

Anggota yang membutuhkan jasa tenaga misalnya untuk membangun rumah melaporkan kebutuhannya tersebut pada pengurus koperasi dan mengisi voucher peminjaman tenaga. Anggota yang membutuhkan jasa tenaga ini diibaratkan sebagai majikan. Pengurus koperasi mencatat dan menghitung jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan, waktu kerja, dan jenis pekerjaannya. Selanjutnya pengurus koperasi akan menghubungi anggota untuk bekerja pada hari dan tempat yang telah disepakati.

Setiap 'peminjaman tenaga' berjangka waktu empat bulan dengan bunga 2 persen. Ini berarti majikan dapat menggunakan tenaga kerja dan berkewajiban melakukan pembayaran jasa tenaga kerja dalam durasi waktu empat bulan.



Pada sisi lain, anggota yang akan berkontribusi jasa tenaga pada satu pekerjaan disebut sebagai pekerja atau karyawan. Untuk satu pekerjaan, mereka perlu menyepakati waktu kerja, besar upah, dan metode pembayarannya dengan pengurus koperasi. Satu hari kerja dihitung delapan jam kerja. Upah yang diterima beragam sesuai jenis pekerjaan. Untuk keahlian khusus misalnya memasang kusen, batu bata dan lain-lain, dihargai 6 ribu rupiah per jam. Sedangkan keahlian umum bagi kaum laki-laki dihargai 5 ribu rupiah per jam dan untuk tenaga perempuan 4 ribu



Anggota Kelompok Tani Lewowerang bangga dengan buku keanggotaannya (atas), Kamilus Tupen Jumat sang inisiator (kanan bawah), Anggota Kelompok menandatangani lembar penerima voucher (kiri bawah).

Foto : Yayasan BaKTI/Yusuf Ahmad

rupiah per jam. Kecilnya upah tenaga kerja perempuan disesuaikan dengan jenis pekerjaannya yang lebih ringan.

Hal yang unik dari koperasi bentukan Kelompok Tani Lewowerang adalah metode pembayaran. Tidak selamanya upah pekerjaan diberikan dalam bentuk uang tunai. Majikan juga

bisa membayar dengan tenaganya kepada koperasi untuk pekerjaan yang kelak dibutuhkan oleh anggota lain. Di sisi lain, karyawan bisa memilih untuk menyimpan sebagian atau seluruh upahnya di koperasi dalam bentuk tabungan pendidikan.

Sebagai koperasi, setiap anggota kelompok memang diwajibkan membayar simpanan wajib sebanyak 100 ribu rupiah dan iuran bulanan sebesar 10 ribu rupiah. Sebagai bukti simpanan, setiap anggota diberikan selebar saham dalam bentuk voucher berisi keterangan keanggotaan dan biodata anggota. Dana yang terkumpul dari simpanan wajib dan iuran bulanan ini digunakan oleh Koperasi untuk membayar upah pekerja bila anggota membutuhkan pembayaran dalam bentuk uang tunai atau untuk menjadi pembayar pinjaman tenaga dari pekerjaan sebelumnya.

Membayar upah dengan tenaga

Anggota koperasi yang menggunakan jasa tenaga kerja anggota koperasi tidak harus membayar dengan menggunakan uang. Sebagai contoh, dalam sehari Daniel karena ia dibantu delapan tenaga dengan upah Rp 5.000 per jam, maka utangnya di koperasi adalah Rp320 ribu. Untuk membayar pinjaman itu, Daniel dapat mengangsurnya selama empat bulan. Jika kemudian, kekurangan uang untuk membayar utuh pinjaman, maka ia dapat membantu anggota lain bekerja di kebun. Upah dia selama bekerja di kebun akan dipotong di koperasi dan selebihnya akan menjadi simpanan.

Mengembalikan kejayaan pangan lokal

Di suatu pagi yang hangat di kampung Honihama, suara pukulan batu untuk memipihkan jagung terdengar bersahut dari rumah ke rumah. Bumbung asap dari kayu bakar, menerobos melalui sela dinding bambu. Para penduduk membuat jagung titi, makanan khas warga. Rasanya sangat gurih. Untuk mengkonsumsinya dapat dicampur dengan air tawar, ataupun kuah ikan dan sayur.

Dulu, masyarakat di kampung Honihama menanam jagung dan beberapa jenis umbi-umbian sebagai pangan utama. Namun makanan pokok adalah jagung. Sementara beras tak begitu tersohor di kampung ini, karena lahan yang begitu gersang.

Lalu, perdagangan antar pulau dengan masyarakat Bugis dan Buton mengenalkan beras. Perlahan-lahan jagung mulai dilupakan dan menjadi makanan pelengkap. Melihat kondisi itu, Kamilus Tupen bersama ibu-ibu anggota

kelompok membentuk unit kegiatan perempuan untuk memproduksi jagung titi.

Kini produksi jagung titi sudah cukup baik, bahkan sebuah restoran dan hotel di kota Lantuka menjadi pemesan setia, serta dijadikan menu di meja makan.

Menghilangkan kelas sosial

Anggota Kelompok Tani Lewowerang tak pernah dibedakan dalam status sosial. Apakah dia seorang tokoh masyarakat, tokoh agama, ataupun pejabat pemerintahan. Adakala dia menjadi “majikan” atau besok akan menjadi “karyawan”.

Sebelum kelompok tani ini berjalan, hanya segelintir orang yang dapat mempekerjakan tenaga. Orang-orang inilah yang menentukan upah setiap orang dan menentukan jangka waktu pekerjaan. Layak atau tidak, tergantung si majikan. “Kami ingin memutuskan itu. Karena setiap orang sama dan memiliki hak,” kata Kamilus.

Salah seorang yang merasakan pentingnya hal itu adalah Thomas Tolang Pari (38). Ia bergabung dengan Kelompok Tani ini pada awal Maret 2015. Sebulan sebelumnya, ia baru saja kembali dari tanah rantau di Malaysia.

Sebelum mengenal Kelompok Tani, saat membangun rumahnya di Desa Watoone, ia menggunakan sistem upah borongan dari pekerja luar kampung. Namun, saat bangunan mencapai tahap 70 persen selesai, ia begitu kecewa melihat hasilnya.

Kekecewaan itu membawanya berkenalan dengan KTL. Awalnya ragu-ragu, namun saat bergabung ia pun semakin yakin. Dengan mengawasi pembangunan rumah, ia dengan mudah melihat kekurangan dan mengatur porsi takaran seperti campuran semen agar kuat.

Keberhasilan dan kesenangan Thomas akhirnya tersebar dari mulut ke mulut. Anggota KTL yang memiliki keahlian khusus tentu mendapat upah lebih baik. Dan cara ini dapat menambah semangat anggota KTL lain, untuk semakin produktif dan mengasah keahlian. Selain menambah daya saing anggota KTL, kisah ini pun diyakini menjadi pendorong bagi sebagian warga untuk menjadi “majikan”.

Melembagakan Usaha Kelompok Tani

Sejak berdiri lima tahun yang lalu, koperasi Kelompok Tani Lewowerang di kampung ini telah memiliki aset senilai 100 juta rupiah. Jumlah ini tentu saja tidak dalam bentuk tunai, melainkan

dalam bentuk waktu kerja dan tenaga yang tersebar ke beberapa anggota kelompok.

Dalam hitungan Sipri, Bendaraha Kelompok Tani, setiap orang yang masih aktif, memiliki aset antara 200 ribu rupiah hingga 400 ribu rupiah yang dapat ditarik baik dalam bentuk uang atau dimanfaatkan dalam bentuk tenaga kerja kelompok karena tak ada aturan yang mengikat.

Menurut Kamilus Tupen, membangun masyarakat tidak hanya butuh keteguhan hati, melainkan ikut pula memberikan pemahaman akan organisasi. Untuk itu, bersama pemerintah desa kelompok ini akan dimasukkan ke dalam bagian dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

BUMDes akan membantu kelompok menjangkau tingkatan paling kecil. Serta menjadikannya semakin kuat dari segi administrasi dan kelengkapan persyaratan aturan keorganisasian dan lembaga. Ketika Kelompok Tani Lewowerang bergabung dengan BUMDes, maka pembagian peran dan penataan hubungan keorganisasian antara pemerintah dan masyarakat akan semakin terbuka.

Perubahan yang terjadi

KTL tak hanya berfungsi menjadi simpanan dan digunakan untuk keperluan pertanian atau pembangunan rumah, melainkan dalam segala sektor, terutama untuk pendidikan. Setiap anggota kelompok yang membutuhkan dana untuk kepentingan anak sekolah, dapat meminjam uang secara tunai atau menabung melalui penggunaan tenaga jasa. “Kami ingin semua anak sekolah dengan baik, maka untuk pendidikan, kami anggap sebagai salah satu prioritas utama yang harus dibantu,” kata Daniel, Sekretaris KTL.

Anggota KTL yang bekerja di luar kampung, seperti di Malaysia, dengan bahagia mengirimkan sebagian penghasilannya ke koperasi kelompok untuk menggunakan jasa tenaga dalam mengerjakan lahan. Di desa ini, ada ratusan warga yang menggantungkan hidupnya menjadi seorang TKI di Malaysia. “Jadi mereka yang berada di Malaysia, konsentrasi bekerja. Setelah lahan mereka siap untuk panen mereka pulang,” kata Kamilus. “Jadi sekarang, di desa ini, hampir dipastikan tak ada lagi lahan tidur.”

INFORMASI LEBIH LANJUT

Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai Praktik Cerdas yang dipromosikan BaKTI, Anda dapat menghubungi kami melalui email info@bakti.or.id

Sosok

Rus, Profil Politisi Perempuan

Oleh
**M. GHUFRAN H. KORDI K.
& SITI ZAHARA**

Tidak banyak politisi perempuan yang menjadi ketua partai. Selain perempuan yang terjun di dunia politik jumlahnya lebih sedikit, perempuan juga masih dianggap tidak mampu menjadi pemimpin publik, apalagi partai politik. Politik diidentikkan dengan dunia laki-laki yang keras, kasar, dan jauh dari moral dan etika. Karena itu, perempuan yang terjun di dunia politik juga dituntut harus berkarakter seperti laki-laki.

Persepsi yang keliru mengenai politik maupun terhadap perempuan tidak mudah dihapus di alam bawah sadar masyarakat di negeri ini. Budaya patriarki masih melingkupi masyarakat, sementara di sisi lain mendorong perempuan untuk berkiprah di ranah publik membutuhkan sejumlah

Foto : Dok. BaKTI-MAMPU

Tumbuh dan dibesarkan di lingkungan keluarga politisi, kemudian aktif sebagai organisatoris menjadi keuntungan bagi Ibu Rus karena telah memiliki kemampuan dan pengalaman yang berlimpah untuk masuk di dunia politik.

persyaratan yang dianggap ideal, namun sangat tidak menguntungkan perempuan, seperti pendidikan dan pengalaman.

Dengan demikian, munculnya satu dua perempuan yang berani tampil di publik akan menjadi contoh terhadap perempuan-perempuan yang lain. Di antaranya adalah Rusiawati Abunawas yang menjadi Ketua DPC (Dewan Pimpinan Cabang) PPP (Partai Persatuan Pembangunan) Kota Kendari sejak 2010-sekarang. Sarjana ekonomi lulusan UNHALU (Universitas Halu Oleo) Kendari ini adalah satu dari sedikit perempuan yang menjadi ketua partai politik di sebuah partai yang berideologi Islam.

Sebagai partai yang menaungi berbagai kelompok dan aliran dalam Islam, baik yang puritan, tradisional, modernis, maupun inklusif, tentu sebagian politisi laki-laki dapat menerima perempuan sebagai ketua di PPP. Namun, tentu tidak mudah bagi seorang Rusiawati untuk diterima sebagai ketua partai di tengah laki-laki dan perempuan yang patriarkis dan puritan dalam beragama.

Aktif di Organisasi

Perempuan yang akrab di panggil Ibu Rus ini adalah seorang organisatoris-aktivis. Karenanya, ketika mampu meraih kursi di DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Kota Kendari dua periode berturut-turut (2009-2014 dan 2014-2019) dan menjadi Ketua DPC PPP Kota Kendari tahun 2010, bukanlah sesuatu yang diraih begitu saja, atau jatuh dari langit. Tetapi hasil dari investasi bertahun-tahun lamanya.

Perempuan yang lahir di Kendari 10 Februari 1963 ini membangun karier politik yang dimulai dari aktif di berbagai organisasi. Sejak tahun 2003 hingga saat ini, Ibu Rus adalah Ketua PMI (Palang Merah Indonesia) Provinsi Sulawesi Tenggara. Artinya, ibu tiga putri ini sudah dua periode menjabat sebagai ketua di organisasi kemanusiaan tersebut, yaitu 2003–2009 dan 2010–sekarang.

Ibu Rus juga menjabat sebagai Ketua HWK (Himpunan Wanita Karya) Sulawesi Tenggara tahun 2003–2008, sebuah organisasi sayap Partai Golkar (Golongan Karya); Ketua Wanita Swadiri Soksi Sulawesi Tenggara 2003–2008, Ketua WPP (Wanita Persatuan Pembangunan) Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2008–2013. Tahun 2002 menjabat sebagai Ketua Dharma Wanita Badan Diklat (Pendidikan dan Pelatihan) Provinsi Sulawesi Tenggara, kemudian Wakil Ketua Tim Penggerak PKK (Pembinaan Kesejahteraan Keluarga) Sulawesi Tenggara tahun 2003–2008.

Pengalaman organisasi inilah yang menjadi modal berharga bagi Ibu Rus saat masuk di dunia politik dan meraih kursi parlemen di DPRD Kota Kendari. Sebagai organisatoris, Ibu Rus tentu mempunyai kemampuan dan pengalaman dalam berhadapan dengan berbagai macam audiens. Apalagi Ibu Rus juga mengikuti berbagai pelatihan dan penataran sehingga dirinya tidak canggung lagi ketika berada di ranah politik yang biasanya penuh dengan adu argumen, lobi, negosiasi, bahkan intrik. Ketika terjun dalam politik, Ibu Rus sudah cukup matang.

Berdarah Politisi

Ibu Rus dibesarkan di tengah keluarga yang memiliki latar belakang sebagai politisi. Insting politik diturunkan dari darah sang ayah, Bapak Abunawas yang juga mantan Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara. Itu berarti, Ibu Rus telah membawa gen politik sejak lahir yang memberi pengaruh besar pada dirinya.

Ditambah dengan suaminya, Yusran Silondae yang merupakan seorang birokrat hingga pernah menjabat Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara 2003-2008. Mendampingi suami sebagai birokrat dan wakil gubernur adalah pelajaran dan pengalaman berharga yang membuat Ibu Rus semakin mantap merambah dunia politik.

Tumbuh dan dibesarkan di lingkungan keluarga politisi, kemudian aktif sebagai organisatoris menjadi keuntungan bagi Ibu Rus

karena telah memiliki kemampuan dan pengalaman yang berlimpah untuk masuk di dunia politik. Tahun 2004 Ibu Rus mencalonkan diri melalui Partai Golkar untuk memperebutkan kursi di DPRD Kota Kendari. Walaupun gagal, Ibu Rus menjadi pendulang suara di daerah pemilihannya.

Tahun 2009, Ibu Rus pindah ke PPP dan kembali mencalonkan diri untuk memperebutkan kursi di DPRD Kendari. Kali ini Ibu Rus memperoleh lebih dari 3.000 suara dan berhasil duduk di DPRD Kota Kendari periode 2009-2014. Menurutnya, sebagai politisi dan ketua partai perempuan, dirinya menghadapi berbagai tantangan yang berat. Dia harus menghadapi pengurus partai dan politisi di parlemen yang sebagian besar laki-laki.

Pada rapat-rapat sering muncul perbedaan pendapat, di mana beberapa politisi laki-laki menggunakan cara-cara yang kasar, seperti memukul dan membanting meja. Menghadapi situasi seperti itu, Ibu Rus menanggapi secara dewasa dengan “kepala dingin”. Tanggapan dan jawaban kepada pemukul dan pembanting meja harus argumentatif dan masuk akal. Karena si pemukul dan si pembanting meja kadang hanya asal bicara dan asal ngomong.

Peduli Perempuan dan Anak

Periode pertamanya menjadi anggota DPRD Kota Kendari, Ibu Rus terlibat aktif mendorong lahirnya kebijakan yang pro perempuan dan anak, di antaranya: Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu bagi Korban dan/atau Saksi terhadap perdagangan orang (human trafficking), Perda Nomor 8 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Kemiskinan, Perda Nomor 19 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan Daerah, Perda Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak, Perda Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengarusutamaan Gender, dan Perda Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis, dan Pengamen.

Pada pemilu legislatif 2014, Ibu Rus kembali mencalonkan diri untuk maju menjadi wakil rakyat di DPRD Kota Kendari. Ibu Rus terpilih menjadi anggota DPRD Kota Kendari untuk periode 2014-2019, kendati menghadapi kampanye hitam (*black campaign*) yang sangat gencar.

Walaupun mempunyai pengalaman yang cukup dan telah menjadi anggota DPRD Kota

Kendari untuk kedua kalinya, perempuan yang menjadi salah satu delegasi dalam Kongres Perempuan Sedunia di Perth Australia tahun 2005 ini, antusias dan mengikuti kegiatan-kegiatan dalam Program MAMPU yang dilaksanakan oleh RPS (Rumpun Perempuan Sultra) Kendari bekerjasama dengan Yayasan BaKTI.

Menurut Ibu Rus, dirinya mendapat banyak manfaat dalam kegiatan-kegiatan Program MAMPU. Ia menjelaskan, kalau selama ini mengikuti bimbingan teknis di Jakarta biasanya yang diberikan hanya bimbingan secara normatif, dengan ceramah. Sementara pelatihan-pelatihan di Program MAMPU, peserta diberikan “metode baru” dan sangat berguna bagi anggota DPRD dalam melaksanakan tugas-tugas di DPRD. Salah satu Pelatihan yang menarik bagi Ibu Rus adalah Gender Budgeting. Pelatihan ini membantu anggota DPRD memahami perencanaan dan penganggaran, sekaligus perencanaan dan penganggaran yang responsif gender. Ibu Rus menyaran agar Pelatihan Gender Budgeting diberikan kepada seluruh anggota DPRD, sehingga mereka dapat memahami prosedur perencanaan dan penganggaran yang lebih adil.

Dengan pengetahuan dan ketrampilan mengenai Gender Budgeting yang telah didapatkan, Ibu Rus berupaya mendorong SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) agar membuat perencanaan dan penganggaran yang responsif gender. Baginya, selama ini perencanaan dan penganggaran tidak menguntungkan perempuan, sehingga banyak sekali kebutuhan perempuan yang terabaikan dalam pembangunan.

Perempuan yang sudah menulis buku berjudul “25 Tahun Perkawinan” yang berisikan pengalaman mendampingi suaminya hingga terjun ke dunia politik ini adalah contoh atau profil politisi perempuan. Sekalipun pada dirinya mengalir darah politisi, suaminya juga seorang birokrat-politisi, namun dia harus membangun karir dengan belajar dan bekerja keras. Dia tidak pernah merasa lebih tahu dan lebih berpengalaman dari yang lainnya. Karenanya dia selalu belajar untuk kepentingan diri dan konstituenya.

INFORMASI LEBIH LANJUT

Penulis adalah Database & Publikasi Media Officer MAMPU-BaKTI dan dihubungi melalui email ghufan@bakti.or.id

Lingkungan

Imbal Jasa Lingkungan Air demi Keberlanjutan Sumber Daya Alam

Oleh **Amy Lumban Gaol**



Peraturan Bupati No. 41/2015 yang ditetapkan tanggal 15 Desember 2015 merupakan peraturan resmi pemerintah setempat yang pertama di Provinsi Sulawesi Selatan mengenai imbal jasa lingkungan air. Setelah melalui proses panjang dan berliku-liku, kini masyarakat Kabupaten Bantaeng memiliki peraturan yang mengatur dasar-dasar pengelolaan sumber air, subyek dan obyek pemakai air serta hak dan kewajiban pihak yang terlibat di dalamnya.

Praktik penggunaan sumber daya alam (SDA) secara tepat sangatlah jarang diketahui masyarakat umum, padahal penerapan secara bijak sangat dibutuhkan dan penting untuk menjaga keberlanjutannya. Pemanfaatan SDA harus dijalankan bersamaan dengan usaha konservasi untuk memastikan ketersediaannya dalam jangka waktu yang panjang.

Dalam acara Sosialisasi Perbup Imbal Jasa Lingkungan Air tanggal 16 Januari 2016, Kepala Bappeda Bantaeng, Prof. Dr. Ir. Samsu Alam, MSI, menegaskan hal itu. "Sumber air merupakan salah satu SDA dan lingkungan yang perlu dijaga karena sudah jelas, air merupakan salah satu elemen utama dalam kehidupan sehari-hari yang dibutuhkan setiap makhluk hidup." Katanya.

Daerah Tangkapan Air (DTA) Biang Loe merupakan salah satu sumber daya lingkungan yang terpenting di Kabupaten Bantaeng karena menjadi sumber air bagi desa-desa di sekitarnya, antara lain Desa Pa'bumbungan, Kampala, Parang Loe, dan Campaga. Sumber air di DTA Biang Loe dimanfaatkan bukan hanya oleh penduduk desa, tapi juga oleh pengguna air dalam jumlah besar seperti PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum) dan perusahaan air minum dalam kemasan, yang kemudian memasang pipa dan beberapa peralatan untuk kepentingan penyediaan air bersih bagi pelanggannya. Pemanfaatan air oleh perusahaan air minum kemasan ini dilakukan berdasarkan peraturan kabupaten dan retribusi dibayarkan ke PDAM dan menjadi sumber pendapatan kabupaten.

Penggunaan air secara masif tanpa adanya timbal balik ke ekosistem berlangsung hingga awal tahun 2013 saat masyarakat Campaga menyuarkan pemikirannya akan pentingnya





Air bukan hanya memenuhi kebutuhan kita untuk minum dan MCK saja, para petani menggantungkan hidup mereka dari air. Foto : Ichsan Djunaed

dibentuk suatu ketentuan yang mengatur penggunaan sumber air dan konsep timbal-balik antara penyedia dan pengguna air.

“Inspirasi ini kemudian diikuti dengan baseline survey oleh AgFor dan LSM Balang, serta dihasilkannya sebuah dokumentasi yang berjudul *Pengelolaan Lanskap Daerah Hulu untuk Penyediaan Air Bersih*,” ujar Mustafa, S.Hut, MP, Kepala Bidang Bina Hutan di Dinas Kehutanan dan Perkebunan Bantaeng.

Hasil yang didapat dari kajian dan survei tersebut memperlihatkan adanya isu dalam manajemen air di DTA Biang Loe. Seiring dengan tujuan proyeknya, AgFor memfasilitasi berbagai pertemuan, diskusi, pelatihan, dan lokakarya mengenai jasa ekosistem/lingkungan bagi berbagai pihak yang terlibat dalam manajemen DTA Biang Loe di Bantaeng.

Agroforestry and Forestry (AgFor) Sulawesi, sebuah proyek yang berfokus pada pengelolaan sumber daya alam, turut berperan serta dalam menjaga keberlangsungan alam. Dengan didanai oleh Departemen Luar Negeri, Perdagangan dan Pembangunan Kanada, AgFor memulai kegiatannya pada tahun 2011 di empat kabupaten, yaitu Bantaeng dan Bulukumba di provinsi

Sulawesi Selatan, serta Kolaka Timur dan Konawe di provinsi Sulawesi Tenggara. Capaian yang dihasilkan dan keinginan untuk menyebarluaskan dampak positif kegiatan proyek ini membuat bertambahnya wilayah kerja pada awal tahun 2014 di Jeneponto dan Gowa (Sulawesi Selatan), Konawe Selatan dan Kota Kendari (Sulawesi Tenggara) serta kabupaten Gorontalo dan Boalemo (Gorontalo).

Pasal 5 Bab IV dalam Perbup No. 41/2015 menyatakan bahwa setiap orang dan/atau badan hukum yang memanfaatkan jasa lingkungan air untuk tujuan komersil dan industri harus memberikan imbal jasa lingkungan air.

“Bukanlah merupakan suatu hal yang mudah untuk membangun pemahaman masyarakat mengenai jasa lingkungan air,” ujar Adam Kurniawan, S.Ip, Ketua LSM Balang, salah satu mitra strategis dalam Pokja Imbal Jasa Lingkungan Air.

“Perlu waktu cukup lama dan persistensi, serta kerjasama berbagai pihak untuk mendapatkan pemahaman yang tepat. Namun, bersama-sama dengan semua mitra, seperti Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Bappedalda (Badan Pengendali Dampak Lingkungan Daerah), para kepala desa, dan perwakilan masyarakat melalui BUMAS (Badan Usaha Masyarakat) dan BUMDES (Badan Usaha Milik Desa), akhirnya peraturan bupati mengenai jasa lingkungan ini ditetapkan.” Tambahnya.



Watershed uphill area di Bulukumba.

Foto : Amy L. Gaol

Tata cara dan jenis pemberian imbal jasa lingkungan air diatur melalui dokumen kesepakatan kerjasama antara penyedia atau penjaga dan penerima jasa lingkungan air dengan melibatkan Tim Pokja Jasa Lingkungan Air. Dengan demikian, penetapan Perbup ini masih memerlukan tindak lanjut komunikasi dan diskusi antara penyedia air (institusi dan masyarakat di hulu) dan pengguna air (masyarakat hilir, PDAM, perusahaan air kemasan) tentang jenis dan mekanisme pemberian imbal jasa dalam bentuk program atau kegiatan untuk membantu penghidupan masyarakat di hulu.

Pernyataan yang senada dengan pasal itu diucapkan oleh Dr. Atiek Widayati, koordinator Komponen Lingkungan proyek AgFor. “Penetapan peraturan bupati mengenai jasa lingkungan air ini berasal dari masyarakat sehingga manfaatnya haruslah dapat dinikmati oleh masyarakat juga. Akan tetapi, haruslah diingat bahwa penetapan peraturan ini sama sekali bukan berarti perjuangan konservasi lingkungan sudah selesai. Malah sebaliknya. Perjuangan yang sebenarnya baru saja dimulai – sekarang semua pihak harus saling bahu-membahu dalam implementasinya.”

Kepala Bappeda Bantaeng, Prof. Dr. Ir. Samsu Alam, MSi, yang juga merupakan koordinator tim

Pokja menegaskan pentingnya konservasi jasa lingkungan, “Imbal jasa lingkungan air ini harus cepat ditangani supaya konservasi sumber air di DTA Biang Loe bisa terlaksana dengan baik. Bappeda akan melibatkan dan bekerjasama dengan sedikitnya empat SKPD, yaitu PU Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Bappedalda untuk implementasi Perbup ini.”

“Jalan panjang menuju tercapainya Bantaeng menjadi kota konservasi lingkungan masih harus ditempuh. Penetapan Peraturan Bupati No. 41/2015 merupakan awal dan pembuka jalan yang baik,” ujar Mustafa, S.Hut, MP, Kepala Bidang Bina Hutan di Dinas Kehutanan dan Perkebunan Bantaeng, “Dan saat ini kami juga dalam proses untuk meningkatkan Perbup ini menjadi Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bantaeng supaya lebih sah dan bermanfaat bagi lebih banyak orang. Insya Allah bisa tercapai.”

Perjuangan masih harus dilanjutkan dengan kerjasama dan keterbukaan berbagai pihak dan instansi yang terkait. Keterbukaan dan kesediaan semua pemangku kepentingan untuk mengimplementasikan Perbup ini tentunya akan membuahkan hasil yang dapat dinikmati bersama sehubungan dengan konservasi SDA.

INFORMASI LEBIH LANJUT

Penulis adalah AgFor Sulawesi Communications Coordinator dan dapat dihubungi melalui email A.Gaol@cgiar.org

Pulau Karanrang dan Kehidupannya

Oleh **Ainun Azwariah**

Indonesia, nama yang sudah tidak asing di telinga kita. Indonesia, negara kita tercinta, negara yang berada di deretan atas tingkat korupsi tertinggi di dunia. Tapi, di sisi lain, Indonesia juga memiliki sejuta potensi alam yang patut untuk dibanggakan. Dibanggakan? Jelas! Sebab tidak semua negara di belahan dunia ini memiliki potensi alam dan sumber daya se-kaya negara kita ini. Indonesia kita tercinta, dengan eksotisme pegunungan dan laut yang tiada duanya. Maka, tidak heranlah, jika ada banyak kelompok-kelompok pencinta alam yang bertebaran, bahkan ada juga kelompok yang seolah-olah mendikotomikan rasa cinta pada alam dengan menamakan dirinya kelompok petualang.

Tapi, yah sudahlah (tanpa bermaksud meng-copy potongan lagu yang pernah hits di negeri ini). Di paper ini, kita- dan saya khususnya- tidak akan membicarakan subjek-subjek dari pencinta alam itu, tapi akan membahas potensi dan keindahan alam di suatu pulau, dan juga masyarakat-masyarakat yang hidup dari potensi tersebut.

Pulau tersebut terletak di Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Pulau Karanrang namanya. Pulau ini merupakan satu dari beberapa gugusan pulau kecil di Kepulauan Pangkep. Untuk menuju ke Karanrang, ada dua alternatif transportasi yang dapat kita manfaatkan. Alternatif yang sebenarnya tidak terlalu berbeda. Saya katakan tidak terlalu berbeda, sebab kedua alternatif tersebut sebenarnya sama-sama melalui jalur laut.



Alternatif pertama, yaitu melalui pelabuhan Paotere, Makassar. Pelabuhan ini merupakan sentra masuk dan keluarnya hasil tangkapan laut dari pulau-pulau sekitar Makassar. Selain itu, pelabuhan ini juga merupakan tempat pembuatan kapal-kapal nelayan dan juga kapal yang terkenal berasal dari Sulawesi, yakni kapal Phinisi. Alternatif kedua yaitu dengan menempuh jalur darat terlebih dahulu selama kurang lebih dua jam menuju ke Kabupaten Pangkep, kemudian dilanjutkan dengan menempuh jalur laut melalui pelabuhan Pangkep.

Alternatif pertama, sebenarnya jauh lebih efisien daripada alternatif kedua. Apabila melalui

pelabuhan Paotere, kita hanya membayar sebesar Rp. 20.000 dengan jarak tempuh hanya sekitar 2 hingga 3 jam perkalangan laut. Sedangkan bila melalui alternatif kedua, dari segi ongkos jauh lebih mahal dibanding alternatif kedua, begitupun dengan jarak tempuh yang semakin lama.

Pulau Karanrang dihuni oleh kurang lebih 3000 jiwa penduduk. Pulau ini terbagi atas 2 bagian dusun, yakni dusun Sejahtera dan dusun Bahagia. Entah atas dasar apa sampai diberi nama unik seperti itu. Mungkin penduduk setempat memberi nama “sejahtera” dan “bahagia” dengan harapan penduduk pulau Karanrang dapat hidup bahagia dan sejahtera. Mata pencaharian penduduk

“Apapun yang dapat menghasilkan uang di laut, kita ambil saja”

sebagian besar adalah sebagai nelayan, sementara sekitar 10% di antaranya berprofesi sebagai pedagang hasil laut. Penduduk yang berprofesi sebagai nelayan memanfaatkan sumber daya laut dengan melakukan penangkapan jenis biota bernilai ekonomi. Permintaan biota laut di pasar yang menjanjikan pendapatan besar masih didominasi oleh jenis biota ekspor, terutama jenis ikan karang dan beberapa jenis ikan pelagis. Namun demikian, permintaan pasar lokal, terutama ikan yang dikategorikan untuk konsumsi kalangan masyarakat kalangan masyarakat menengah dan atas juga masih menjadi primadona.

Kegiatan eksploitasi yang telah berlangsung ratusan tahun berdampak pada perubahan tingkah laku biota yang “menyesuaikan diri” dengan aktivitas yang dilakukan nelayan. Perubahan tingkah laku biota diatasi nelayan dengan memilih jenis alat tangkap yang dapat meningkatkan hasil tangkapan. Kondisi ini menjadikan dinamika perubahan alat tangkap menjadi sangat tinggi. Adopsi dan inovasi merupakan dua proses yang ditempuh nelayan untuk mengatasi persoalan seperti ini. Demikian pula kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan operasional nelayan ikut mengalami perubahan seiring dengan kondisi perekonomian negara.

Desakan kebutuhan juga telah turut memacu nelayan untuk terus-menerus memperbaharui alat tangkap yang mereka miliki. Hingga, tidak heran jika berkembang opini di masyarakat Karanrang “Apapun yang dapat menghasilkan uang di laut, kita ambil saja”. Miris memang, sebab opini seperti itulah yang kemudian dapat menimbulkan sikap apatis dari para masyarakat untuk senantiasa mengeksploitasi hasil laut, tanpa mempedulikan cara memperbaharuinya.

Dalam hal ini, peran pemerintah lokal sangatlah kita harapkan. Pemerintah yang bertugas untuk mengolah negara ini, memang sudah seharusnya mengambil tindakan untuk turut serta mengolah kekayaan alam kita. Apalagi, Indonesia merupakan negara maritim yang sebagian besar dikelilingi oleh lautan. Kita tidak

bisa terus-terusan tinggal diam melihat kejanggalan ini. Di sisi lain, masyarakat pulau Karanrang yang masih tergolong awam, dan hanya tahu bagaimana memanfaatkan hasil laut, tidak bisa kita salahkan. Dalam hal ini, keseimbangan kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat dapat memberi efek positif bagi pulau Karanrang khususnya, dan Indonesia pada umumnya.

Salah satu kejanggalan yang terjadi, berdasarkan fakta yang ada, masyarakat pulau Karanrang sebagian besar menyelam ke dasar laut hanya dengan menggunakan mesin kompressor. Mesin yang lazimnya digunakan untuk kendaraan bermotor dan alat-alat elektronik, dan sangat tidak lazim untuk digunakan oleh manusia sebagai alat bantu bernafas di dalam air. Efek paling fatal yang terjadi jika kita menyelam menggunakan kompressor adalah kelumpuhan seluruh organ tubuh, bahkan dapat menyebabkan kematian. Sudah sangat banyak kasus fatal yang menimpa masyarakat Karanrang yang menyelam menggunakan kompressor, namun ternyata kejadian tersebut tidak menyurutkan nyali para penyelam Karanrang untuk menyelam menggunakan kompressor.

Hal paling miris, bahwa ternyata kasus-kasus fatal seperti disebutkan diatas, sama sekali tidak mendapat respon apa-apa dari pemerintah. Tidak ada campur tangan pemerintah untuk meminimalisir kesalahan yang ada di pulau Karanrang. Namun, jika berbicara tentang pilkada, maka berbondong-bondonglah para calon kepala daerah untuk datang dan meng-kampanyekan diri agar dipilih. Negara kita ini memang hanya negara dengan “oknum-oknum” yang haus kekuasaan dan kenikmatan hidup, tanpa memperdulikan kesengsaraan hidup orang bawah yang sebenarnya berkontribusi besar dalam kehidupan mereka.

Dalam hal pelayanan umum pun, masyarakat Karanrang masih belum sepenuhnya menerima pelayanan maksimal. Berdasarkan fakta yang ada, pasokan listrik hanya dialirkan dari pukul 18.00 petang hingga pukul 00.00 malam. Warga Karanrang pun akhirnya sangat terkendala dengan pasokan listrik yang sangat minim tersebut. Aktivitas mereka yang membutuhkan listrik pun akhirnya harus terkendala pasokan yang minim.

INFORMASI LEBIH LANJUT

Tulisan ini dibuat berdasarkan observasi penulis saat berkunjung ke Pulau Karanrang, Kabupaten Pangkep.

Penulis dapat dihubungi melalui email aiyunazwariah@gmail.com

51 Juta

penduduk Indonesia buang air besar sembarangan di samping sungai dan pantai (nomor 2 tertinggi di dunia setelah India).

Buruknya sanitasi dan higiene juga mempengaruhi kualitas air:

1/2

dari sampel air yang disimpan

telah terkontaminasi bakteri E.coli berdasarkan studi di Sulawesi Selatan.

Sumber: Microbiological effectiveness of boiling and safe water storage in South Sulawesi, Indonesia, Sodha et al. 2011, Journal of Water & Health.

Setiap harinya, anak-anak di Indonesia berenang dan mandi di sungai yang penuh dengan tinja dan limbah bekas mencuci.

Sumber : UNICEF: Baseline Household Knowledge, AttitudBS and Practices (KAP) of Sanitation and Hand Washing Practices Survey Results.



12,9%

penduduk Indonesia tidak memiliki toilet yang memadai.

Sumber: RISKESDAS 2013

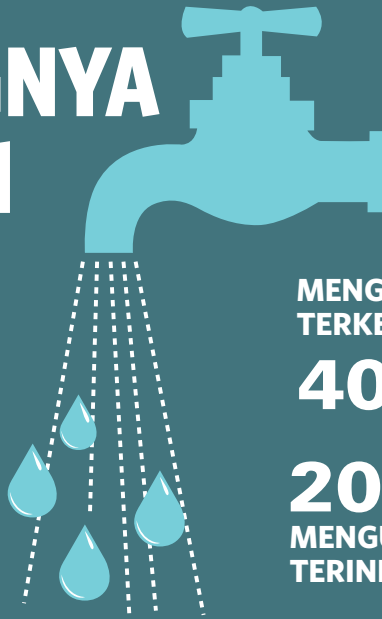


Setiap kotoran yang mengalir di sungai menyebabkan jutaan anak-anak terkena diare dan meninggal.

Dengan mengubah kebiasaan buang air besar sembarangan menuju ke toilet maka kita dapat menyelamatkan nyawa jutaan anak-anak dan memberikan mereka kesempatan untuk meraih cita-citanya.



PENTINGNYA MENCUCI TANGAN



**MENGURANGI RESIKO
TERKENA DIARE HINGGA**

40%

**20%
MENGURANGI RESIKO
TERINFEKSI PNEUMONIA**

Sumber: Freeman et al (2014): Water, sanitation and health protection of the human environment WHO Geneva 2004.



Peningkatan fasilitas sanitasi, akses air bersih, dan sabun sangat penting untuk privasi dan martabat para remaja putri serta memiliki dampak positif pada peluang pendidikan anak-anak perempuan.

Sumber: The London School of Hygiene and Tropical Medicine, 2012.



Mempromosikan mencuci tangan dengan sabun merupakan upaya yang dinilai paling efektif dalam meningkatkan kesehatan masyarakat.

Sumber: Curtis, V., Schmidt, W., Luby, S., Florez, R., Toure, O., Biran, A., (2011) Hygiene: new hopes, new horizons Lancet Infect Dis 2011; 11: 312-21.



Mambuat masyarakat untuk mencuci tangan dengan sabun setelah menggunakan kamar kecil atau sebelum makan, memerlukan perubahan perilaku.

Sumber: Biran, A., et al. (2014) Effect of a behaviour-change intervention on handwashing with soap in India (SuperAmma) a cluster-randomised trial, Lancet Glob health 2014; 2: e145-154.

DAMPAK DARI BURUKNYA AIR, SANITASI DAN KEBERSIHAN TERHADAP PENDIDIKAN



1 dari 5 anak-anak perempuan di seluruh dunia yang berusia di atas sekolah dasar (SMP) harus putus sekolah. Kurangnya fasilitas sanitasi sekolah menjadi penyebab terbesar.

Sumber: UNESCO, Institute for Statistics (2010). Out-of-school adolescents. Montreal, Canada: UNESCO Institute for Statistics.

PENURUNAN JUMLAH MURID YANG ABSEN HINGGA

50%

sejak pihak sekolah mendukung kegiatan mencuci tangan dengan sabun dan air.

Sumber: O'Reilly et al. The Impact of a school-based safe water and hygiene programme on knowledge and practices of students and their parents: Nyaza province, Western Kenya. 2006. Epidemiol. Infect. 2008, 136, 80-91.



Ketersediaan toilet di sekolah meningkatkan jumlah siswa.

Sumber: Adukia, A (2013) Sanitation and Education. Working Paper, Harvard University.

Hanya

5-10%



siswa yang mencuci tangan memakai sabun setelah selesai menggunakan toilet sekolah.

Sumber: UNICEF survey on handwashing in schools in Eastern Indonesia. 2013.



Dengan jumlah 26 juta pelajar dan hampir 3 juta guru di sekolah dasar yang ada di Indonesia, ada kesempatan besar untuk memperbaiki sanitasi dan meningkatkan kebersihan di sekolah-sekolah yang berdampak pada kesejahteraan dan kesehatan anak-anak Indonesia.

Sumber: UNICEF survey on handwashing in schools in Eastern Indonesia. 2013.



**DIDIK
ANAK ANDA
UNTUK TIDAK
MEMPERKOSA
BUKAN CARA
BERPAKAIAN**



Oleh **Nadia Hana Abraham**



Ilustrasi Ichsan Djunaed

Saya benci untuk menjadi naif. Dan saya tidak dapat berpura-pura setuju dengan orang yang memiliki pemikiran yang naif.

Sebagai seorang perempuan, ketika seseorang berkata, “Jika tidak mau diperkosa, pakailah pakaian yang tertutup”, saya tidak dapat menghentikan pertanyaan-pertanyaan yang muncul di pikiran saya. Pertanyaan seperti: “Bagaimana jika korban pemerkosaan orang yang sudah tua, atau malah anak-anak? Apakah tubuh mereka begitu mengundang orang untuk berbuat tindakan kriminal? Apakah tubuh mereka begitu mengundang orang untuk merampas hak mereka atas tubuh mereka sendiri sebagai seorang manusia yang merdeka?”

Dengan berpikir menghubungkan pemerkosaan dengan cara seseorang berpakaian, kita sama saja menyamaratakan kaum pria sebagai penjahat. Bahwa mereka tidak mampu bertindak dengan empati dan rasionalitas, bahwa mereka tidak memiliki kemampuan dan kesadaran untuk menghormati hak setiap makhluk ciptaan Tuhan. Ini adalah sifat naluri. Inilah yang membedakan kita dengan hewan: bahwa kita adalah makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki kemampuan untuk bertindak tidak hanya dengan mengandalkan insting dan nafsu, tetapi dengan empati dan rasionalitas.

Dengan berpikir bahwa pakaian yang menyebabkan seseorang diperkosa, kita bertindak tidak adil. Pemikiran “Jika tidak mau diperkosa, pakailah pakaian tertutup” sama saja dengan menutup mata pada kasus-kasus pemerkosaan yang terjadi pada para pria, para orangtua, dan anak-anak; bahwa kita sebagai seorang perempuan selalu takut terhadap kaum pria; bahwa di dunia ini kaum pria tidak mungkin menjadi seorang korban.

Selama kita berpikir bahwa tubuh perempuanlah yang membuat pemerkosaan terjadi, bahwa tubuh seorang perempuan adalah satu-satunya hal yang dapat menimbulkan nafsu seseorang untuk melakukan tindakan pemerkosaan, itu berarti kita menutup mata pada penyebab utama pemerkosaan terjadi: yaitu keinginan si pemerkosa untuk mendominasi sang korban.

Kita selalu mendengar, “Ini yang harus kamu lakukan agar tidak diperkosa.” Tetapi kita tidak pernah mendengar, “Jangan memperkosa. Hormati hak dan batasan-batasan orang lain.”

Di dunia ini, pada faktanya, bukan hanya perempuan yang dapat dilecehkan, laki-laki dan anak-anak pun bisa. Ini bukan tentang kita melawan orang lain atau dunia, ini adalah tentang kita melawan diri kita sendiri untuk tidak melakukan tindakan kriminal dan mengambil hak orang lain. Sekali lagi, kita semua adalah makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki kemampuan untuk bertindak tidak hanya dengan mengandalkan insting dan nafsu, tapi empati dan rasionalitas.

Sebagai manusia dengan kemanusiaan yang telah kita kandung sejak lahir, seharusnya kita dapat sadar bahwa jika ingin dihargai Tuhan, hormati ciptaan-Nya. Ajarkan putra-putri kita untuk hidup sebagai manusia dengan empati dan rasionalitas. Ajarkan bahwa sebagai manusia, ia dilahirkan untuk bertindak dengan kedua hal tersebut.

Didik putri-putri kita untuk menjadi pribadi yang mandiri dan kuat, serta dapat melihat permasalahan-permasalahan yang berada di sekitarnya dengan objektif tanpa bias, bahwa tujuannya adalah mencari akar dari permasalahan dan penyelesaian untuk permasalahan tersebut. Didik mereka agar tidak peduli apapun pakaian yang mereka kenakan, mereka adalah cantik dan terhormat.

Didik putra-putra dan putri-putri kita untuk menghargai hak-hak satu sama lain, untuk memiliki kepribadian yang sopan dan menghormati orang lain tidak peduli apa pakaian mereka dan dari mana mereka berasal, bahwa hal tersebut adalah bagian dari diri mereka sebagai manusia.

INFORMASI LEBIH LANJUT

Nadia Hana Abraham adalah seorang mahasiswa yang tinggal di Jakarta. Ia dapat dihubungi dinadiahraham@yahoo.co.id atau di [@NadiaAbraham97](https://twitter.com/NadiaAbraham97) di Twitter.

Tulisan ini diambil dari majalah online Magdalene dan dapat dibaca pada link berikut:

<http://magdalene.co/news-703-didik-anak-anda-untuk-tidak-memperkosa-bukan-cara-berpakaian.html> Magdalene.com adalah sebuah majalah yang berfokus pada isu gender dan budaya Indonesia

MAMPU-BaKTI

Workshop

Legal Drafting

dan PPRG

Oleh **M. GHUFRAN H. KORDI K.**

Pada hari Rabu 10 Februari 2016 bertempat di Kantor Program MAMPU (Maju Perempuan Indonesia untuk Penanggulangan Kemiskinan) Yayasan BaKTI (Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia) dilaksanakan Workshop Legal Drafting yang diikuti oleh staf Program MAMPU-BaKTI.

Workshop menghadirkan narasumber tunggal Prof. Dr. Syahrudin Nawi, SH., MH., Guru Besar Fakultas Hukum dan Dosen Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar, yang juga staf ahli Legal Drafting Pemerintah Kota Makassar. Sedangkan fasilitator workshop adalah Yudha Yunus dari LSKP (Lembaga Studi Kebijakan Publik).

Materi yang disampaikan dalam Workshop Legal Drafting adalah, Pengertian dan Dasar Hukum Legal Drafting; Perencanaan; Pembentukan/Penyusunan; serta Pembahasan; Pengesahan, Penetapan, dan Pengundangan.

Kebutuhan Program MAMPU-BaKTI

Workshop ini bertujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan tim MAMPU-BaKTI mengenai legal drafting, baik prinsip maupun proses pembentukannya. Pengetahuan dan

ketrampilan ini, bagi tim Program MAMPU-BaKTI sangat penting karena salah satu tujuan akhir atau EOPO (end of program outcome) Program MAMPU-BaKTI adalah pemerintah mengeluarkan kebijakan yang pro poor dan responsif gender.

Yayasan BaKTI dan mitranya tidak hanya mendorong lahirnya kebijakan yang pro poor dan responsif gender, tetapi juga harus mendorong proses menghasilkan kebijakan tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku. Kebijakan yang dihasilkan tidak sesuai dengan tata aturan, maka kebijakan tersebut tidak hanya cacat metodologis, tetapi juga tidak sesuai dengan kebutuhan atau masalah yang terjadi.

Banyak sekali kebijakan yang dibuat untuk mengatasi masalah tertentu, nyatanya bukan hanya tidak bisa mengatasi masalah tersebut, implementasi kebijakan itu pun sulit dilakukan karena identifikasi masalah tidak tepat. Ada kebijakan yang dibuat dengan hanya menyalin dan menempel (copy paste) kebijakan dari daerah lain. Padahal masalah di tiap daerah selalu berbeda, baik karena faktor sosial-budaya, geografi, demografi, dan sebagainya.

Masih berlaku umum bahwa, pembentukan Peraturan Daerah (Perda) tidak mengikuti tata aturan yang berlaku, seperti



Foto : Dok. BaKTI-MAMPU

diamanahkan dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan aturan turunannya. Ada Perda yang dibuat dengan hanya menyalin dan menempel Perda daerah lain, sehingga hanya mengganti nama, nomor, nama daerah, dan sebagainya. Ada juga Perda yang dibuat dengan tidak dimulai dari penyusunan naskah akademik (NA). Ada juga Perda dibuat dengan dimulai dari rancangan draft pasal per pasal, kemudian NA dibuat belakangan, sehingga terlebih dahulu melahirkan anak daripada induknya.

Belajar dari Perda yang Dibatalkan

Jika mitra Yayasan BaKTI mendorong lahirnya Perda, maka Perda yang didorong harus sesuai dengan kebijakan nasional, sesuai dengan kebutuhan daerah, dan proses pembentukan Perda harus sesuai dengan tata aturan. Ini penting agar Perda yang dihasilkan bukan sekadar menambah daftar Perda yang akan dibatalkan oleh pemerintah pusat.

Membuat Perda yang nantinya tidak bisa diimplementasikan atau dibatalkan oleh pemerintah pusat tidak hanya mencoreng para inisiator dan pihak-pihak yang terlibat dalam pembentukannya, tetapi sekaligus bagian dari melakukan pekerjaan yang tidak berguna dan menghambur-hamburkan anggaran negara.

Tim MAMPU-BaKTI dan mitra Yayasan BaKTI harus memahami dan memastikan agar Perda yang didorong sesuai dengan kebutuhan, serta proses pembentukannya sesuai dengan aturan. Anggota

DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) pun perlu didorong untuk belajar dari proses pembentukan perundang-undangan secara benar. Karena dengan begitu anggota DPRD dapat membangun sistem penyusunan perundang-undangan, sekaligus mereka dapat memahami konten Perda yang dibuat sehingga memudahkan mereka dalam melakukan tugas pengawasan.

Sering terjadi di daerah (provinsi dan kabupaten/kota), pembuatan Perda dimulai dari pembuatan draft, bahkan draft Perda sudah ada sebelum dimasukkan dalam Properda (program peraturan daerah) atau Prolegda (program legislasi daerah), karena draft-draft tersebut disalin dari perda daerah lain.

Menurut Prof. Dr. Syahrudin Nawi, SH., MH., tahapan pembentukan perundang-undangan yang diatur oleh aturan adalah dimulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, penetapan, dan pengundangan. Untuk menghasilkan perundang-undangan yang berkualitas maka tahapan ini harus diikuti dengan benar, tidak boleh dibalik-balik.

Implementasi Perda

Untuk implementasi Perda dibutuhkan peraturan pelaksanaannya. Perda-perda yang berkualitas sekalipun sulit diimplementasikan jika tidak mempunyai peraturan pelaksanaannya. Aturan implementasi dalam bentuk Peraturan Gubernur/Peraturan Bupati/Peraturan Walikota. Aturan implementasi tersebut mengatur dan menjelaskan secara teknis tugas dan tanggung

jawab tiap SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang terlibat dalam implementasi Perda.

Jika diperlukan dapat dibuat Rencana Aksi Daerah (RAD) untuk mempermudah setiap SKPD menyusun program dan penganggaran setiap tahunnya, dengan mengambil dari dokumen RAD. Jika Perda tersebut mengatur lembaga layanan dan sejenisnya, maka harus disiapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan lainnya untuk memudahkan penyediaan dan pengoperasian lembaga layanan.

Dengan demikian perlu ditegaskan bahwa, untuk membuat kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan daerah dan berkualitas serta dapat diimplementasikan, maka selain harus mematuhi aturan yang mengatur pembentukan kebijakan, juga harus membuat aturan tersebut secara komprehensif, dari aturan induk dan turunannya.

Workshop PPRG

Sehari setelah pelaksanaan workshop Legal Drafting, pada hari Kamis sampai Jumat 11-12 Februari 2016, Program MAMPU (Maju Perempuan Indonesia untuk Penanggulangan Kemiskinan) Yayasan BaKTI (Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia) juga melaksanakan Workshop PPRG (Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender) di Hotel Pesona Makassar. Workshop PPRG diikuti oleh tim Program MAMPU-BaKTI.

Fasilitator Workshop adalah Misbah Hasan dari Seknas FITRA (Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran) dan Yudha Yunus dari LSKP (Lembaga Studi Kebijakan Publik) Makassar. Sedangkan narasumber Workshop adalah Dr. Ir. Novaty Eny Dunga, MP., Ketua Program Studi Strata dua (S2) Gender dan Pembangunan Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin (UNHAS) Makassar.

Workshop ini bertujuan meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan tim MAMPU-BaKTI mengenai PPRG, baik prinsip perencanaan dan penganggaran responsif gender, proses penganggaran pada APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah), maupun penggunaan GAP (Gender Analysis Pathway) dan GBS (Gender Budget Statement).

Pengetahuan dan ketrampilan PPRG, bagi tim Program MAMPU-BaKTI sangat strategis dan penting karena salah satu tujuan atau EOPO (end of program outcome) Program MAMPU-BaKTI adalah pemerintah mengeluarkan kebijakan yang

pro poor dan responsif gender. Kebijakan yang pro poor dan responsif gender dianggap ideal bila dapat ditelusuri penganggarnya di APBD.

PPRG, Alat untuk Mencapai PUG

PPRG adalah alat untuk mencapai pengarusutamaan gender (PUG). Untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender melalui perencanaan dan penganggaran, maka PPRG merupakan alat yang digunakan oleh semua lembaga negara di pusat dan daerah untuk membuat perencanaan dan penganggaran.

Sebagai alat, pihak-pihak yang terlibat dalam upaya pencapaian kesetaraan dan keadilan gender harus memahami dan menggunakan PPRG tersebut untuk menghasilkan perencanaan dan penganggaran (APBD) yang responsif gender.

Namun, pada kenyataannya PPRG masih merupakan barang asing di berbagai daerah. Di kalangan pemerintah di daerah, PUG dan PPRG masih dianggap sebagai sesuatu yang terkait dengan perempuan saja. Bahkan segala sesuatu yang berbau atau terkait gender disamakan dengan perempuan. Karena itu, PUG dan PPRG dianggap hanya sebagai tugas instansi atau SKPD (satuan Kerja Perangkat Daerah) yang mengurus perempuan.

Perencanaan dan Penganggaran untuk Semua

Karena itu, bagi Dr. Ir. Novaty Eny Dunga, MP, perlu dikampanyekan dan diperkenalkan bahwa PPRG adalah perencanaan dan penganggaran untuk semua. PPRG menekankan pada peruntukan anggaran bagi siapa yang sangat membutuhkan, tentu harus berdasarkan analisis GAP dan GBS atau alat analisis lainnya untuk membantu melihat ketepatan perencanaan dan penganggaran. PPRG bukanlah alat yang digunakan untuk membuat perencanaan dan penganggaran yang terpisah dengan perencanaan dan penganggaran yang sudah ada. PPRG adalah alat untuk memastikan bahwa perencanaan dan penganggaran yang dibuat sesuai dengan kebutuhan.

Untuk menjadikan suatu perencanaan dan penganggaran *pro poor* dan responsif gender, maka perencana dan penyusun anggaran di SKPD harus memunyai pengetahuan dan perspektif mengenai gender dan kemiskinan. Perspektif gender membantu melihat perempuan dan laki-laki dari sudut yang tidak konvensional. Peran perempuan dan laki-laki tidak dilihat sebagai



Foto : Dok. BaKTI-MAMPU

sesuatu yang turun dari langit, tetapi lahir dari budaya dan struktur sosial.

Karena itu, berbagai faktor yang menjadikan perempuan berada di posisi subordinat, termarginalisasi, mengalami kekerasan, dan kemiskinan bukan karena lahir bersama lahirnya perempuan di bumi ini, melainkan karena struktur sosial, budaya, kebijakan, dan berbagai faktor yang dikonstruksi oleh manusia.

Perspektif gender, yang salah satunya melahirkan PPRG, membentuk dan mengembalikan roh perencanaan dan penganggaran agar lebih adil bagi semua: perempuan, laki-laki, anak, kelompok marginal, disabilitas, dan minoritas. Perencanaan dan penganggaran juga memprioritaskan kelompok-kelompok yang sangat rentan, yang biasanya sulit dipotret dalam perencanaan dan penganggaran yang konvensional.

Anggaran Responsif Gender

Selama ini perencanaan dan penganggaran tidak hanya sangat maskulin, tetapi juga sangat kota sentris dan hanya menyangga kepentingan kelas menengah. Inilah yang kemudian melahirkan kemiskinan dan ketimpangan yang melebar. Rasio gini Indonesia yang mencapai 0,41 atau ketimpangan orang kaya dan miskin yang semakin melebar, tentu semakin menempatkan perempuan pada posisi yang lebih sulit dan berat, karena perempuanlah yang menerima dampak terbesar dari melebarnya ketimpangan tersebut.

Kemiskinan juga berwajah perempuan (*feminisasi kemiskinan*), sementara

penanggulangan kemiskinan berwajah laki-laki, sehingga tidak atau sedikit sekali menyentuh perempuan. Kondisi tersebut mesti diubah yang dimulai dari perencanaan dan penganggaran yang adil terhadap perempuan dan laki-laki.

Perencanaan yang responsif gender dan anggaran yang responsif gender (*gender responsive budgeting*) diharapkan menghasilkan pembangunan yang adil dan merata. Anggaran responsif gender (ARG) merupakan anggaran yang mengakomodasi keadilan bagi perempuan dan laki-laki dalam memperoleh akses, manfaat, berpartisipasi dalam mengambil keputusan dan mengontrol sumberdaya serta kesetaraan terhadap kesempatan dan peluang dalam menikmati hasil pembangunan (Bappenas, 2012).

ARG bukanlah anggaran yang terpisah bagi laki-laki dan perempuan, yang sering salah dipahami. Sehingga alokasi anggaran yang diperuntukkan bagi kegiatan untuk perempuan dianggap sebagai ARG, padahal mungkin alokasi tersebut belum tentu sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sebenarnya. ARG menekankan pada penggunaan belanja negara (pusat dan daerah) untuk pelayanan hak-hak dasar masyarakat, yang selama ini sebagian besar hak dasar masyarakat itu tidak menyentuh perempuan, anak, dan kelompok disabilitas. ARG juga menekankan keterlibatan aktif dari stakeholders (pemangku kepentingan) dan partisipasi perempuan dalam pembangunan.

INFORMASI LEBIH LANJUT

Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai kegiatan MAMPU-BaKTI, Anda dapat menghubungi Sdri. Lusia Palulungan, Program Manager MAMPU-BaKTI melalui email lpalulungan@bakti.or.id

Edukasi Pencegahan Kekerasan Seksual

Oleh **Andi Arifayani**

“Diambil sama sopir, baru dibawa ke tempat kosong.” Sese kali kepala sekolah dasar yang saya wawancara memperbaiki kacamata nya. Ia menceritakan tentang anak SMP di Kabupaten Gowa yang dibawa oleh supir pete-pete dan diduga dilecehkan. Kepala sekolah itu bertutur kalau Anak SMP tersebut kemudian trauma dan memilih tidak bersekolah dalam waktu lama.

Beberapa waktu yang lalu kasus dugaan pencabulan terhadap anak usia 11 tahun di Jalan Syekh Yusuf Kabupaten Gowa kembali terjadi. Pelakunya adalah tetangga korban yang mengiming-imingi korban dengan uang Rp.5000,- sebelum melakukan aksi kejahatannya. Pelaku pencabulan tersebut memang akhirnya bisa ditangkap, dan di akhir berita yang saya baca, pelaku akan dijerat dengan hukuman maksimal 5 tahun penjara. Hukuman yang menurut saya sangat tidak setimpal dengan efek trauma yang dirasakan korban.

Kasus-kasus tersebut hanya satu dari banyak kejadian kekerasan seksual terhadap anak. Data dari komisi perlindungan anak, pada tahun 2010-2014 terdapat 21,6 juta kasus pelanggaran hak anak. Dari jumlah itu, 58 persen dikategorikan sebagai kejahatan seksual.

Angka-angka tersebut menunjukkan bahwa negeri ini sedang dalam keadaan darurat kekerasan seksual. Kekhawatiran tersebut membuat Yayasan Lembaga Mitra Ibu dan Anak membuat kegiatan pencegahan kekerasan seksual dengan tema 'Aku sayang badanku' di SDN Sungguminasa IV Kabupaten Gowa. Dalam kegiatan ini, anak-anak diajarkan bagaimana menjaga diri mereka agar terhindar dari kekerasan seksual baik yang disebabkan oleh lingkungan sekitar, atau yang bersumber dari dunia maya.

Kegiatan tersebut juga dihadirkan dua orang psikolog yaitu Titin Florentina dan Syawaliah Gismin. Masing-masing memberikan materi di beberapa kelas terpisah untuk anak perempuan dan anak laki-laki. Dengan bahasa yang sederhana dan



mudah dimengerti anak-anak, kedua psikolog ini mulai menjelaskan tentang pentingnya menjaga diri agar terhindar dari kejahatan seksual.

Dalam salah satu materi yang diajarkan, anak-anak diperkenalkan pada bagian-bagian tubuh mana saja yang boleh disentuh oleh orang lain. Mereka diajak mengenali mana sentuhan baik, sentuhan buruk dan sentuhan membingungkan. Kalau ada orang yang meminta atau memaksa anak untuk memperlihatkan bagian tubuh mereka yang terlindungi atau memaksa anak melakukan hal yang tidak disukai, mereka harus berteriak dan melapor kepada guru, keluarga atau lari ke tempat keramaian.

Kegiatan edukasi pencegahan kekerasan seksual memang sangat penting, mengingat perkembangan teknologi membuat akses ke dunia tanpa batas bernama internet menjadi tidak terbatas. Jika dibandingkan dengan 20 tahun silam, orang tua jaman sekarang punya tantangan besar. Anak-anak sekolah dasar, khususnya di kota, sudah punya akun facebook dan bahkan BlackBerry Messenger (BBM). Ancaman kekerasan seksual tidak hanya datang dari dunia nyata, pun bisa disebabkan oleh dunia maya. Hal itu diperburuk dengan konten-konten pornografi yang 'bertebaran' di mana-mana. Teknologi di satu sisi bisa jadi kawan, dan di sisi lain bisa menjadi musuh yang menyedihkan.

Anak-anak terlihat antusias di kegiatan edukasi “Aku Sayang Badanku”. Materi yang dianggap tabu bisa diajarkan sambil bernyanyi serta menari.

Sumber: Andi Arifayani

Selama proses edukasi “Aku Sayang Badanku” berlangsung, anak-anak terlihat antusias. Materi yang biasa dianggap tabu dan jarang dibicarakan ternyata bisa diajarkan sambil bernyanyi serta menari. Anak-anak itu terlihat begitu bersemangat menyerap semua materi yang diberikan.

Edukasi “Aku Sayang Badanku” tidak hanya dilakukan di kabupaten Gowa, tetapi juga akan dilaksanakan di beberapa sekolah di Makassar. Tidak hanya itu, kegiatan ini juga akan dilanjutkan dengan Focus Group Discussion (FGD) di beberapa lingkungan di kota Makassar. Tujuannya memang untuk membangun kesadaran sedari dini agar anak-anak tidak mudah menjadi korban pelecehan atau kekerasan seksual.

Semoga dengan kegiatan ini semakin banyak anak yang teredukasi serta pihak sekolah bisa melakukan langkah-langkah pencegahan menghadapi kekerasan seksual terhadap anak-anak.

INFORMASI LEBIH LANJUT

Penulis adalah blogger peserta Kelas Menulis Kepo. Tulisannya dapat dibaca di <http://andi-arifayani.com>

The Dark Side of Chocolate



“Anak-anak adalah sumber daya yang paling berharga di dunia dan harapan terbaik untuk masa depan.”

John Fitzgerald Kennedy

Oleh **Andi Feri Pebriari**

“Mama... saya mau seperti coklat kalau dilihat orang.” Kalimat manja keluar dari mulut seorang anak kecil dengan senyum lebar kepada Ibunya.

“Mengapa Ade mau seperti coklat?” Tanya Ibunya.

“Karena coklat itu manis, Ade mau kalau dilihat orang-orang, Ade kelihatan manis.”

Jawab anak kecil itu dengan wajah polos.

Penggalan percakapan di atas sempat saya dengarkan ketika menikmati pisang peppe di kawasan kuliner kota Makassar. Kebetulan anak kecil dan Ibunya itu duduk di sebelah meja saya yang juga menikmati kuliner khas Makassar itu. Mendengarkan percakapan tersebut, tiba-tiba ingatan membawa saya pada sebuah film dokumenter yang berkisah tentang coklat dan anak kecil.



Ilustrasi | Ihsan Djunaed

Film dokumenter tersebut berjudul *The Dark Side of Chocolate*. Sebuah film dokumenter yang dirilis pada 16 Maret 2010 menggambarkan bagaimana cokelat yang begitu sangat manis di lidah saat kita nikmati dengan label perusahaan terkenal, ternyata di dalamnya terkubur tumpukan cerita pahit anak-anak di Afrika. Film yang berdurasi 61 menit ini disutradarai langsung oleh **Miki Mistrati**, seorang jurnalis kewarganegaraan Denmark. Film ini menampilkan sebuah investigasi tentang perdagangan dan perbudakan anak di bawah umur untuk dijadikan pekerja perkebunan kakao yang berlokasi di Pantai Gading dan Ghana.

Adegan yang menandai mulainya investigasi Mistrati berlokasi di Jerman, tepatnya Koelnmesse. Saat itu dia mengunjungi beberapa stand perusahaan cokelat terkenal. Dia pun sempat berbincang dengan beberapa direktur pemasaran perusahaan cokelat tersebut tentang lokasi perkebunan yang menjadi bahan baku produk cokelat mereka. Direktur Pemasaran Fridiel, Stella

Bernrain, Guylian Belgian Chocolate, dan Barry Callebaut memberikan jawaban bahwa asal bahan baku untuk produk cokelat mereka dari Afrika (Pantai Gading dan Ghana).

Tapi saat Mistrati menanyakan “Apakah mereka mengetahui adanya praktik perdagangan dan perbudakan anak di perkebunan kakao di Afrika?”. Mieke Callebaut selaku Direktur Pemasaran Guylian Belgian Chocolate menegaskan bahwa mereka yakin tidak ada praktik seperti itu di Afrika, karena mereka (baca: *Chocolate Manufactures Association*) telah menandatangani Harkin-Engel Protocol yang berisi 6 butir kesepakatan yang bertujuan untuk mengakhiri praktik penjualan dan perbudakan anak dalam produksi kakao.

Tak puas dengan jawaban itu, Mistrati terbang ke Afrika (Pantai Gading dan Ghana) untuk membuktikan apakah Harkin-Engel Protocol memang terlaksana atau hanya protokol belaka. Ternyata di sana dia menemukan fakta begitu banyak anak-anak di usia 10-15 tahun yang menjadi pekerja di perkebunan kakao. Fakta ini terekam jelas pada kamera tersembunyi di baju Mistrati. Salah satunya adalah pemandangan anak kecil yang menarik karung yang besarnya tiga kali lipat dari badan anak itu.

Selain itu, ada tiga anak yang sempat ia wawancarai langsung. Mariam, Yaya Konate, dan Zanga Traore merupakan korban human trafficking yang dijadikan pekerja perkebunan kakao di Pantai Gading dan Ghana. Alasan kondisi ekonomi keluarga yang memaksa mereka untuk bekerja di perkebunan kakao walaupun hanya diupah sedikit dan bahkan tak diupah seperti pemaparan narator dalam film ini.

Hasil temuan Mistrati di lapangan mengharuskan dia untuk mengkonfirmasi kepada perusahaan yang mengelola perkebunan tersebut. Penanggung jawab perusahaan tentu saja membantah temuan itu, begitu juga dengan pihak pemerintah. Perjuangan Mistrati tidak berhenti di situ saja, dia mengirim undangan untuk memperlihatkan dokumentasi temuannya kepada Nestle, Mars Incorporated, Kraft, ADM, Barry Callebaut dan perusahaan-perusahaan yang



Definisi 'anak' menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Undang-Undang ini mempertegas bahwa anak tidak boleh dijadikan pekerja sebelum memasuki usia 18 tahun.

bergabung dalam Chocolate Manufactures Association,. Tapi sayang, undangannya ditolak.

Film ini diakhiri dengan penggambaran upaya terakhir dari Mistrati untuk membuka mata dunia dan melihat praktik-praktik terlarang yang terjadi di Afrika. Upaya terakhir ini sebagai tanggapan akan penolakan undangan yang dia kirim sebelumnya. Mistrati menyiapkan layar besar di samping kantor pusat Nestle di Swiss, posisi layar sangat ideal di mana karyawan yang baru datang untuk bekerja dapat melihat secara jelas video anak-anak yang bekerja di industri kakao. Bagaimana dengan Indonesia?

Menyaksikan *The Dark Side of Chocolate*, membuat rasa ingin tahu saya membunyah. Hal

yang pertama saya lakukan adalah mencari informasi tentang dunia kakao. Dengan kata kunci pencarian “Negara penghasil kakao terbesar di dunia” muncullah deretan berita dan artikel yang berkaitan kata kunci itu. Pantai Gading dan Ghana merupakan negara penghasil kakao yang menduduki posisi pertama dan kedua sesuai dengan data CorpWach. Di urutan ketiga membuat saya terkejut, ternyata diisi oleh Indonesia. Memang selama ini saya tidak terlalu tertarik dan minim pengetahuan dengan perkebunan kakao, ketertarikan lebih kepada perkebunan kopi karena aktivitas pendampingan petani kopi yang saya geluti sekarang.

Hal yang menjadi pertanyaan di kepala adalah “Apakah praktik yang terjadi di Pantai Gading dan Ghana juga terjadi di Indonesia?”. Pertanyaan ini muncul bukan tanpa alasan. Data sekunder yang memperlihatkan Indonesia menjadi negara ketiga penghasil terbesar kakao dunia mungkin bisa menjadi landasannya. Pendekatan sederhana yang kita bisa pakai adalah; apabila Indonesia menghasilkan kakao terbanyak ketiga berarti banyak lahan kakao yang produktif dan membutuhkan pekerja (petani), dari banyaknya pekerja yang dibutuhkan apakah ada atau tidak pekerja anak di dalamnya?



Source: mindit.ca

Definisi 'anak' menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dan Undang-Undang ini mempertegas bahwa anak tidak boleh dijadikan pekerja sebelum memasuki usia 18 tahun.

International Labour Organization (ILO) Jakarta bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) menerbitkan hasil survei pada tahun 2010 dan temuan 1,76 juta merupakan pekerja anak dari sekitar 58,8 juta anak berusia 5-17 tahun. Angka yang sangat tinggi ini memberikan penjelasan bahwa masih banyaknya pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Ketenagakerjaan No.13 Tahun 2003 yang terjadi di Indonesia.

Temuan ILO Jakarta dan BPS walaupun ada kesamaan dengan temuan Mistrati di Afrika yang menyangkut pekerja anak, tetapi terdapat perbedaan pula. Secara umum persamaan kedua temuan ini adalah adanya pelanggaran tentang pekerja anak yang faktor utamanya karena masalah ekonomi. Tetapi perbedaan pada temuan keduanya adalah di Afrika pekerja anak merupakan korban perdagangan dan perbudakan sedangkan di Indonesia disebut enkulturasi.

Zahratul Husaini dalam skripsinya menjelaskan pengertian enkulturasi adalah suatu proses di mana seorang individu menyerap cara berfikir, bertindak yang merasa mencerminkan kebudayaannya. Misalnya keluarga yang berusaha menanamkan nilai-nilai kemandirian pada anak. Nilai-nilai yang ditanamkan dalam keluarga memengaruhi setiap tindakan seorang anak di dalam masyarakat. Anak akan terdogma dengan nilai kemandirian yang mengesampingkan usianya untuk bekerja.

Walaupun ada perbedaan pola pekerja anak seperti penjelasan di atas, Indonesia harus siap dengan kemungkinan terburuk terjadinya perdagangan dan perbudakan anak untuk kebutuhan yang berskala industri. Selain mengantisipasi kemungkinan terburuknya, selayaknya pemerintah berbenah untuk mengurangi angka pekerja anak di Indonesia dari data tahun 2010 sesuai dengan temuan ILO Jakarta dan BPS untuk mencapai target "Indonesia Bebas Pekerja Anak di Tahun 2022".

INFORMASI LEBIH LANJUT

Penulis adalah blogger peserta Kelas Menulis Kepo dan penggerak komunitas muda Bulukumba. Tulisannya dapat dibaca di <http://penabiru.net>

Artikel

Kedaulatan Energi dan Listrik

Oleh: **Mudrajad Kuncoro**

Pemerintah akan memangkas target proyek pembangkit listrik dari 35.000 megawatt menjadi 16.000 MW. Pernyataan Rizal Ramli, Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Sumber Daya, ini bertentangan dengan komitmen Presiden Joko Widodo dan Menteri ESDM yang berukuh tetap akan menjalankan program pembangunan pembangkit listrik 35.000 MW.

Kontroversi semacam ini jelas "tidak menyenangkan", kontra-produktif, dan memberikan sentimen negatif bagi iklim investasi di Indonesia. Apakah ini cermin dari kebijakan energi yang tidak jelas arah dan targetnya? Ataukah memang kedaulatan energi dan listrik hanya cita-cita?

<http://batukarinfo.com/komunitas/articles/kedaulatan-energi-dan-listrik>

Kelompok Wanita Tani di SulSel: Pemberdayaan Perempuan untuk Ketahanan Keluarga

Kelompok Wanita Tani Cora Uleng terbentuk melihat buruh tani di Kabupaten Soppeng berpenghasilan jauh dari layak. Kegiatan kelompok ini yaitu budidaya tanaman sayur dan melakukan pengembangan usaha hasil olahan pangan seperti usaha kripik emping jagung dan rengginang.

Inisiatif untuk membentuk organisasi yang mawadahi ibu-ibu rumah tangga muncul dari mimpi A. Muhammad Ilham untuk memberdayakan para perempuan di daerahnya agar bisa hidup mandiri. Pada tahun 2014. Hadirlah Kelompok Wanita Tani Cora Uleng, yang memanfaatkan pekarang rumah untuk budidaya sayur dan tanaman lokal. Kemudian hasilnya diolah menjadi produk pangan lokal seperti kripik, rengginang dan lain-lain. Dalam hal produksi makanan jadi mereka mengelolanya secara home industri. Hasil dari penjualan akan ditabung. Kelompok Wanita Tani Cora Uleng merupakan binaan organisasi kewirausahaan sosial Asosiasi Pedagang Kaki Lima yang juga mengembangkan sejumlah 120 kelompok wanita tani, UKMK, pedagang kaki lima dan usaha kuliner lainnya.

<http://batukarinfo.com/komunitas/articles/kelompok-wanita-tani-di-sulsel-pemberdayaan-perempuan-untuk-ketahanan-keluarga>

Referensi



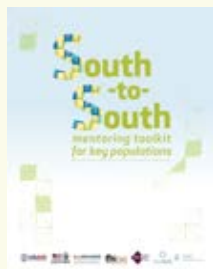
Policy Brief:

Mengintegrasikan Perencanaan Pembangunan Desa

Dalam norma pasal 79 UU No 6/2014 tentang Desa (UU Desa) ditegaskan bahwa dokumen RPJM Desa dan RKP Desa menjadi satu-satunya dokumen perencanaan pembangunan di desa. Kedudukan dokumen perencanaan desa yang kuat ini menyiratkan makna bahwa desa ber-daulat secara politik untuk mengkonsolidasikan seluruh program/kegiatan pembangunan di desa. Apakah pihak di luar desa tidak diperbolehkan lagi terlibat dalam pembangunan di desa?

Policy Brief ini dipublikasikan oleh Institute for Research and Empowerment

<http://batukarinfo.com/referensi/policy-brief-mengintegrasikan-perencanaan-pembangunan-desa>



South-to-South Mentoring Toolkit for Key Populations

This toolkit is made possible by the generous support of the American people through the United States Agency for International Development (USAID) and the U.S. President's Emergency Plan for AIDS Relief (PEPFAR). The contents are the responsibility of the LINKAGES project and do not necessarily reflect the views of USAID, PEPFAR, or the United States Government

<http://batukarinfo.com/referensi/south-south-mentoring-toolkit-key-populations>



Kegiatan di BaKTI

1 Maret 2016

Diskusi News Café “Masyarakat Adat Kajang dalam Jangkauan Perubahan Kebijakan: Proses Partisipatif Pengembangan Perda Hukum Adat Kajang”

Yayasan BaKTI bekerjasama dengan Proyek Agfor Sulawesi menyelenggarakan Diskusi News Café dengan tema Masyarakat Adat Kajang dalam Jangkauan Perubahan Kebijakan: Proses Partisipatif Pengembangan Perda Hukum Adat Kajang, bertempat di Kantor BaKTI, Makassar. Hadir sebagai narasumber, Bapak Agus Mulyana dari AgFor-CIFOR, Ketua Dinas Perhutanan dan Perkebunan Bulukumba Ibu Andi Misbawati Wawo, dan Camat Kajang (Labbiria) Bapak Andi Buyung.

Dengan tujuan untuk berbagi informasi dan pengetahuan tentang isu-isu seputar Penetapan Peraturan Daerah tentang Pengukuhan, Pengakuan, dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (Perda P3MHA),



diskusi dihadiri oleh lebih dari 30 peserta berasal dari rekan media, perwakilan pemerintah daerah, akademisi, pekerja LSM, mitra pembangunan internasional, dan masyarakat umum. Di akhir diskusi, Bapak Pratiknyo Purnomosidhi, Koordinator Proyek AgFor untuk Provinsi Sulawesi Selatan mengatakan bahwa kegiatan diskusi seperti ini sangat bagus dan informatif, baik melalui presentasi atau pun komentar dan tanggapan semua peserta mengenai masyarakat adat Kajang. Kegiatan ini bisa dijadikan acuan dan sarana berbagi info terutama kepada pemerintah daerah dan akademisi dari provinsi lain di Indonesia yang mengalami kasus/permasalahan sama.

18 Maret 2016

Pemutaran dan Diskusi Film “The Mahuzes”

Perpustakaan BaKTI kembali menggelar Pemutaran dan Diskusi film berjudul “The Mahuzes” karya Expedisi Indonesia Biru/Watchdoc. Film yang berdurasi 1 jam 24 menit ini berkisah tentang bagaimana tanah adat di Papua terancam keberadaannya dengan masuknya perusahaan-perusahaan perkebunan yang akan mengambil alih kebun sagu penduduk dan merubahnya menjadi kebun sawit dan sawah padi. Perlawanan masyarakat setempat jelas tergambar dalam film dokumenter yang banyak menampilkan gambar cantik dari atas dengan menggunakan drone ini.

Setelah film diputar, dilanjutkan dengan diskusi yang berlangsung menarik dan seru. Sebagai pembuka, peserta diminta memberikan kesan setelah menonton film. Salah satu peserta mengungkapkan bahwa cerita yang ditemukan dalam film sama dengan realitas yang diceritakan oleh teman sekampusnya yang datang dari Papua, bahwa tanahnya tergusur, ada yang menjual ke perusahaan kemudian digunakan untuk merantau, belajar ke Makassar. Peserta yang hadir dalam kegiatan ini sebanyak 18 orang berasal dari kalangan blogger, dosen, konsultan, pelajar, mahasiswa, peneliti, ibu rumah tangga dan staf BaKTI sendiri.

21 Maret 2016

Kelas Bimbingan Pengisian Formulir Beasiswa Australia Award

Penerimaan Beasiswa Australia Award untuk tahun ajaran 2017 telah dibuka mulai tanggal 1 Februari 2106 dan akan berakhir pada 30 April 2016. Beasiswa ini adalah salah satu beasiswa favorit yang banyak diburu oleh calon Magister dan Dotor dari Indonesia, selain karena kuotanya yang selalu lebih banyak dari program beasiswa sejenis juga karena fasilitas beasiswa yang baik dan memudahkan peserta. Seperti tahun sebelumnya, BaKTI kembali mengadakan kelas bimbingan Pengisian Formulir. Bekerjasama dengan Ibu Siti Sahraeny Ambassador dan Alumni

Australia Award untuk wilayah Sulawesi Selatan dan Barat, kegiatan ini telah dilaksanakan dua kali di Kantor BaKTI.

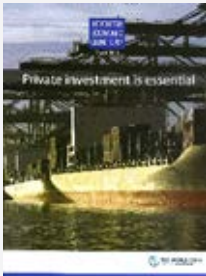
Pada pertemuan pertama, kegiatan diikuti oleh sebanyak 20 peserta dimana rata-rata peserta menerima informasi kegiatan ini melalui milist Sahabat BaKTI dan wall Facebook BaKTI. Diharapkan melalui kelas bimbingan ini, akan lebih banyak peserta dari Makassar yang mengirimkan formulir dengan kualitas yang bagus, karena menurut ibu Eny seringkali peserta gagal untuk melaju ketahapan seleksi selanjutnya karena kesalahan-kesalahan dasar saat mengisi formulir. Kelas bimbingan ini akan berlangsung sampai akhir bulan April 2016.



Perempuan Berdaulat ala Maros

PENERBIT MAUPE dan TIFA Foundation

Buku ini menghimpun refleksi penting perempuan pelaku program sekaligus menawarkan narasi gambaran faktual selama Maupe memperoleh dukungan spirit dan sumber daya dari Tifa. Buku ini berisi curahan hati sekaligus dinamika perempuan Maros dalam pelaksanaan pemilihan gubernur Sulawesi Selatan tahun 2013, pemilu legislatif 2014 serta testimoni perempuan atas Sekolah Politik Perempuan Maupe (SPPM).



Private Investment is Essential

PENERBIT The World Bank

Pada tahun 2015 pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya sebesar 4,8%. Untuk mempercepat pertumbuhan, Indonesia harus mengandalkan perluasan ruang fiskal dalam jangka pendek, sambil memperkenalkan reformasi untuk memfasilitasi investasi dan mengurangi biaya berusaha untuk jangka menengah. Isu-isu lain yang dibahas edisi kali ini mencakup: reformasi sektor logistik Indonesia yang berperan penting bagi membangun daerah tertinggal serta diversifikasi ekonomi; transisi ke energi berkelanjutan yang bisa didukung penyesuaian harga, regulasi, dan kebijakan investasi; juga naiknya dukungan publik untuk membuat kebijakan agar membalik tren pengentasan kemiskinan yang melambat serta naiknya ketimpangan.



Tanah dan Udara; Kumpulan Peraturan

PENERBIT Pusat Pengelolaan Ekoregion Sulawesi, Maluku dan Papua

Buku ini merupakan buku kumpulan peraturan yang disusun oleh Pusat Pengelolaan Ekoregion Sulawesi, Maluku dan Papua. Peraturan-peraturan didalamnya dibuat oleh Menteri Negara Lingkungan hidup seperti peraturan mengenai pengendalian pencemaran udara, ambang gas emisi gas buang kendaraan bermotor tipe baru, baku mutu emisi sumber tidak bergerak bagi usaha/atau kegiatan industri dan peraturan lainnya sekaitan dengan aspek lingkungan Tanah dan Udara.



Kepemimpinan OMS Memperkuat Demokrasi; Pendekatan, Temuan dan Inovasi

PENULIS William E. Aipipidely dan Metta Yanti

Di Indonesia, OMS (organisasi Masyarakat Sipil) sangat dibutuhkan agar demokrasi semakin matang dan bermakna. Kehadiran OMS yang memiliki kesadaran, pengetahuan dan keterampilan politik dalam kepemimpinannya menjadi salah satu sumber energi yang mendorong gerak demokrasi. Dalam buku ini dipaparkan kegiatan pelatihan kepemimpinan masa depan OMS oleh Satunama melalui program Civic Education for future Indonesia leaders (CEFIL)